



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064



RENCANA STRATEGIS
**DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan disusun berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 dan memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2024-2029, dan Renstra Badan Pangan Nasional tahun 2024-2029. Adapun susunan sistematika dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 terdiri dari pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan Isu – isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan penutup.

Secara substansi, perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029 ini tidak terlepas dari perencanaan pembangunan pada Urusan Pangan dan Pertanian, sehingga secara keseluruhan berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan lanjutan dalam pembangunan pertanian dan penyediaan pangan serta konsumsi pangan yang aman dan sehat. Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mengarah pada peningkatan kinerja pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kepulauan Riau,



Dr. Rika Azmi, S.TP., MM
Pembina Utama Muda
NIP 197412082002122005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-8
1.3. Maksud dan Tujuan	I-12
1.4. Sistematika Penyusunan Renstra	I-13
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-14
2.1.3. Kinerja Pelayanan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	II-18
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	II-27
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	II-28
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-28
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-28
2.2.2. Isu Strategis	II-30
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.....	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2. Strategi	III-6
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	III-9

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANIV-1

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan IV-1

4.1.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif IV-1

4.1.2. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... IV-122

4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030 IV-123

4.3. Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2030 IV-123

BAB V PENUTUP V-1

5.1. Kesimpulan V-1

5.2. Kaidah Pelaksanaan V-1

5.3. Pengendalian dan Evaluasi V-2

5.4. Pedoman Transisi V-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	II-15
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	II-16
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	II-17
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	II-29
Tabel 2.5	Perumusan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	II-35
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau	III-5
Tabel 3.2	Perumusan Strategi Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	III-7
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau	III-7
Tabel 3.4	Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan	III-11
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2030	IV-4
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2030	IV-53

Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-121
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030	V-123
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2030	VI-124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau	I-1
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	II-2
Gambar 2.2	Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022-2024.....	II-19
Gambar 2.3	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp.) Tahun 2022-2024.....	II-20
Gambar 2.4	Skor PPH Konsumsi Tahun 2022-2024.....	II-21
Gambar 2.5	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2022-2024	II-22
Gambar 2.6	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Holtikultura (%) Tahun 2022-2024	II-23
Gambar 2.7	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Tahun 2022-2024.....	II-24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan. Pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Penyelenggaraan sistem budi daya pertanian berkelanjutan bertujuan untuk: (1) meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor; (2) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani; dan (3) mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pengertian pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan

manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Seiring dengan penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan akan memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dengan berpedoman pada RPJMD guna mendukung pencapaian visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 secara umum dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah; Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya;

dan hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; Program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
4. Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan Perangkat Daerah terkait. Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra Perangkat Daerah, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output antar-Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan. Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan Hasil Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah.
5. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah

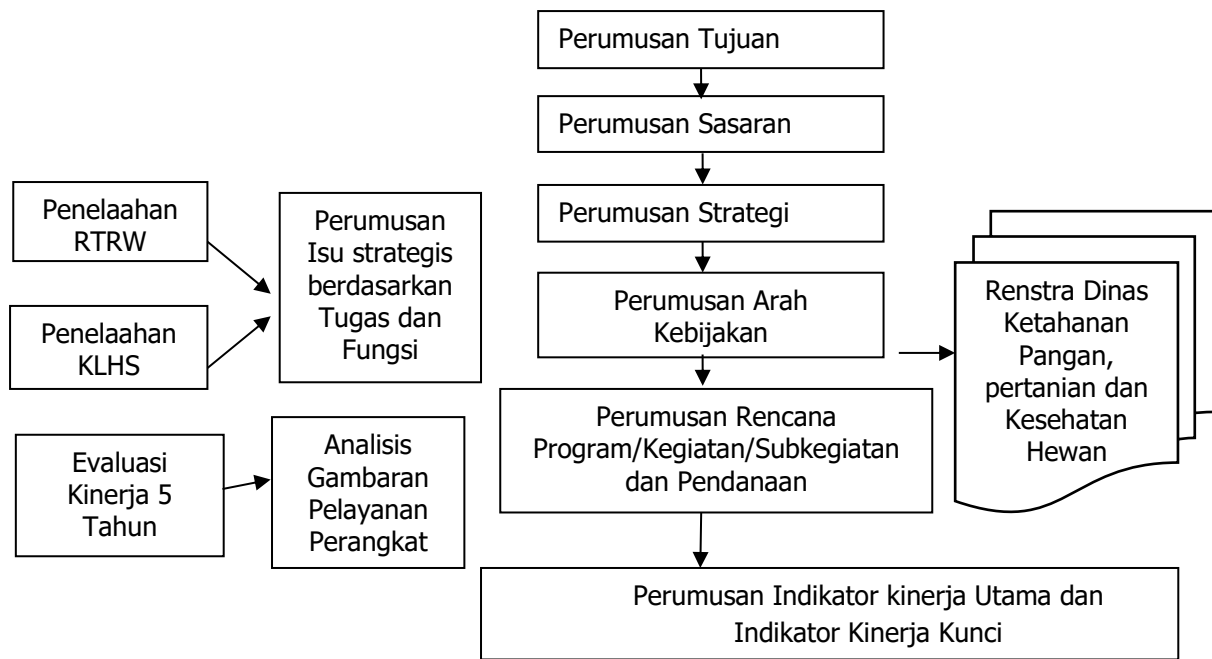
menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah. Setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, kepala menyampaikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi Bappeda. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

6. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi sebelum ditetapkan; Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program

prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

9. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini, Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

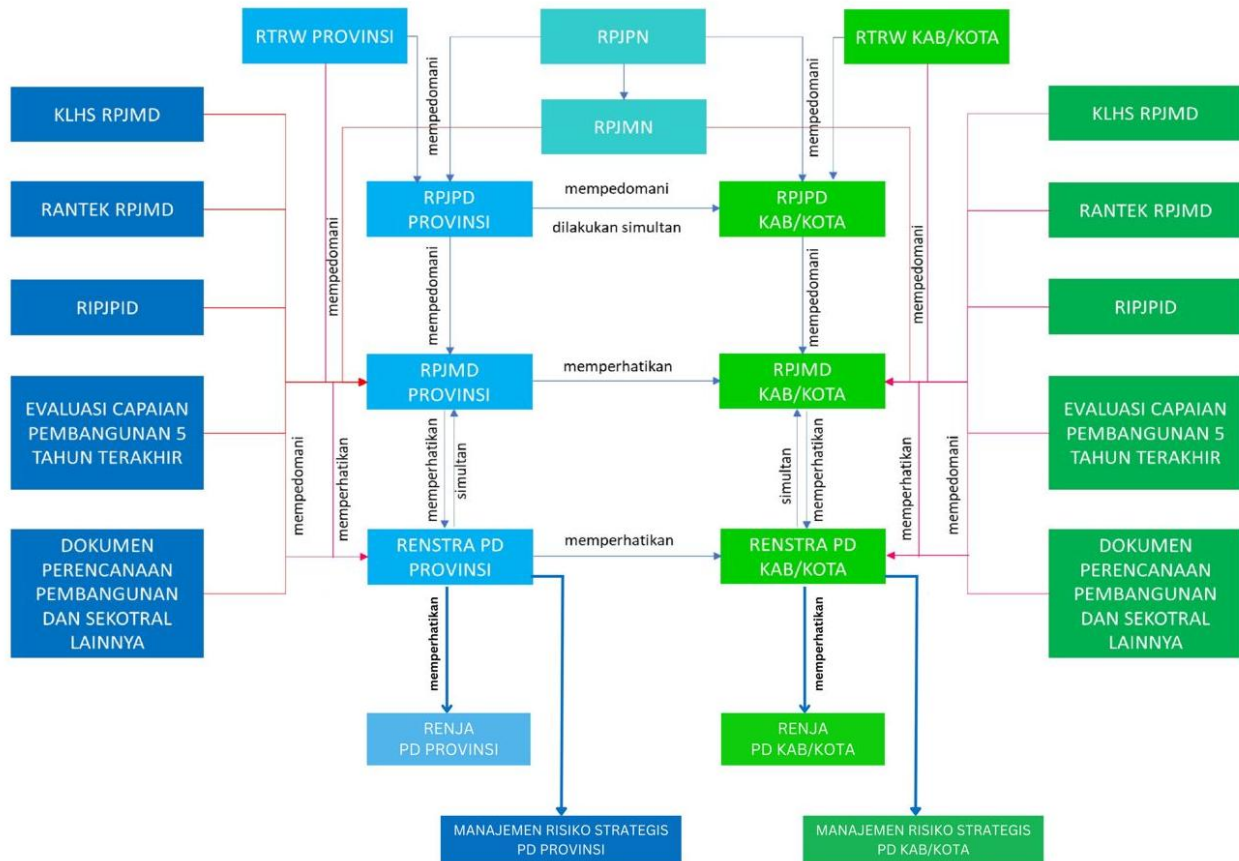
Tahap penyusunan rancangan awal Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan didahului dengan pengumpulan data dilanjutkan pengolahan dan analisis data kinerja selama lima tahun sebagai gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya dilakukan perumusan permasalahan dan penelaahan dokumen perencanaan yang terkait, seperti Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam perumusan isu strategis. Perumusan isu-isu strategis akan dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran. Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan, dan akhirnya dirumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, serta penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan. Proses penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Kesehatan Hewan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan yang penting. Renstra akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu Renstra Tahun 2025-2029 juga menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan di bidang pangan dan pertanian selama kurun waktu tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan perlindungan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
 24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 67 Tahun

- 2011;
27. Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Kebijakan Pembangunan Pertanian
28. Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2015 tentang Kesehatan Hewan
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah beberapa kali dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
37. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Kesehatan Hewan adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Kesehatan Hewan kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pangan dan pertanian selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi dan Misi RPJMD.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pangan dan pertanian kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan,

pertanian dan Kesehatan Hewan.

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Kesehatan Hewan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Kesehatan Hewan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Renstra

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Kesehatan Hewan mengacu pada Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, meliputi: Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan, dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, meliputi: Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu strategis.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi tentang Tujuan, Sasaran, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARMAN BIDANG URUSAN, berisi tentang Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

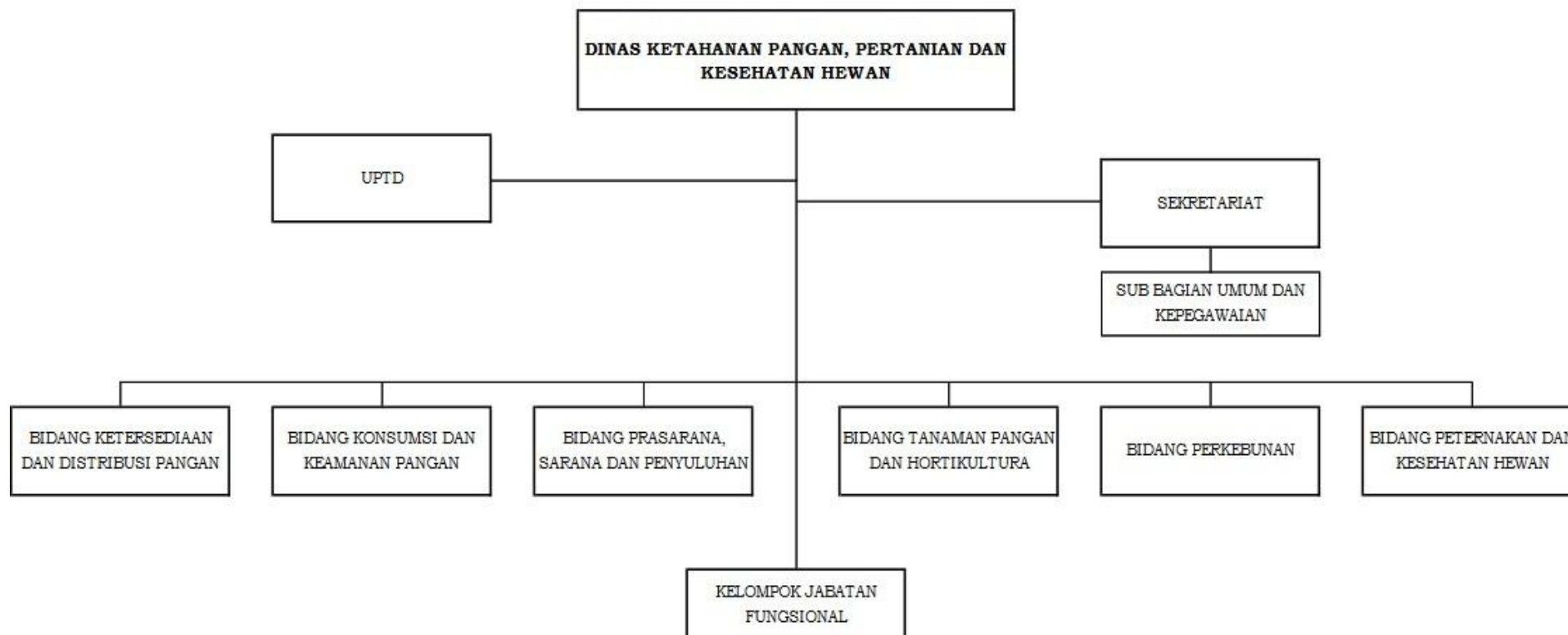
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Perda tersebut, Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
6. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
7. Bidang Perkebunan
8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN
HEWAN TIPE A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023



Pada struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau memiliki 1 kepala dinas, 1 sekretariat dan 6 bidang, serta 1 kelompok jabatan fungsional tertentu. Struktur tersebut telah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bergerak dalam urusan ketahanan pangan, pertanian dan Kesehatan hewan. Semua program dan kegiatan telah tertampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang/bagian dalam mencapai target kinerja organisasi.

1. Kepala Dinas

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Unit Pelayanan Teknis Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Unit Pelayanan Teknis Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Unit Pelayanan Teknis Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta

bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Unit Pelayanan Teknis Daerah;

- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas seperti di maksud di atas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian.
- b. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah
- c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
 - i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - j. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
 - l. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - m. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai rincian tugas:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. penyiapan bahan analisis, kajian ketersediaan pangan daerah, pengelolaan dan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) provinsi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;

- f. penyiapan bahan koordinasi, pengaturan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait distribusi dan harga dan pangan;
- g. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan rumusan, pengumpulan data dan informasi serta pelaksanaan kebijakan terkait distribusi dan harga pangan;
- h. penyiapan bahan pengumpulan data dan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- i. penyiapan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- j. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- k. pelaksanaan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- l. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- m. penyiapan bahan pengumpulan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
- n. penyiapan bahan pendampingan/kajian, bahan pengaturan, pengendalian, pemantauan terkait Kerawanan Pangan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan..

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan dan Keamanan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi terkait konsumsi

- pangan;
- c. penyiapan bahan pemantauan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait konsumsi pangan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - e. penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - f. penyiapan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
 - g. penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan peta pola konsumsi pangan dan pendokumentasian terkait Konsumsi Pangan;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi bimbingan teknis, bahan analisis dan kajian, bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, bahan bimbingan dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - j. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu dan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
 - l. pelaksanaan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - m. pelaksanaan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - n. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis, bahan koordinasi, bahan analisis dan kajian, bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama

- dan informasi keamanan pangan;
- o. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- p. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- q. penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- r. penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD), bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Lahan dan Irigasi, Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, serta Sarana dan Penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait lahan dan irigasi, pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. penyiapan peta pengembangan tata ruang dan tata guna lahan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian dan irigasi;
- d. penyiapan dan pelaksanaan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian lahan dan irigasi;
- e. menyiapkan penyusunan laporan dan pendokumentasian terkait Lahan dan Irigasi;
- f. pelaksanaan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin

pertanian;

- g. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, bimbingan pendampingan, pelayanan investasi pertanian dan supervisi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- h. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, informasi dan media, dibidang kelembagaan, ketenagaan dan metode serta sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- i. penyiapan penyusunan program, bahan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- j. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- k. penyiapan penyusunan dan pengelolaan database Sistem Informasi Manajemen Penyuluh (SIMLUH) pertanian;
- l. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- m. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- n. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi terkait kelembagaan penyuluhan pertanian;
- o. pengoordinasian pelaksanaan kinerja penyuluh pertanian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai ugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai rincian tugas:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait tanaman pangan, hortikultura, dan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan

- dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan tanaman pangan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi, kebutuhan dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan;
 - d. penyiapan bimbingan peningkatan mutu, data informasi, produksi, perlindungan/proteksi pada penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
 - e. penyiapan sekolah lapang tanaman pangan;
 - f. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam;
 - g. penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan;
 - h. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan varietas unggul hortikultura;
 - i. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran tanaman hortikultura yang beredar;
 - j. penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan hortikultura;
 - k. penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hortikultura;
 - l. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hortikultura;
 - m. pelaksanaan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu hortikultura;
 - n. pelaksanaan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
 - o. penyiapan bimbingan peningkatan mutu, data informasi, produksi, perlindungan/proteksi pada penerapan teknologi budidaya Hortikultura;
 - p. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan

- Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- q. penyiapan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - r. penyiapan fasilitasi promosi produk dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - s. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - t. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Produksi Perkebunan, Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Perkebunan mempunyai rincian tugas:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan, dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi perkebunan
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman perkebunan;
- d. penyiapan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan, penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan koordinasi pengujian mutu benih, sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman terkait Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan benih dan

- pengembangan varietas unggul;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
 - h. pelaksanaan penyiapan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - i. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - k. pelaksanaan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
 - l. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan terkait Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - m. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) pada terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - n. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - o. penyiapan fasilitasi promosi produk pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - p. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil dan menyiapkan kebutuhan alat pengolahan hasil terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pembibitan dan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT pembibitan dan produksi peternakan;
- c. penyiapan bahan pengawasan mutu, pengujian benih/bibit HPT terkait Pembibitan dan Produksi Peternakan;
- d. penyiapan bahan pengelolaan sumberdaya genetik hewan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih melalui jaminan kemurnian dan kelestarian terkait pembibitan dan produksi peternakan;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- f. Penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- g. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- h. pelaksanaan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- i. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- j. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan melakukan pemberantasan penyakit hewan serta penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- k. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha

- distributor obat hewan;
 - m. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan terkait Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - n. pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - o. pelaksanaan sertifikasi veteriner pengeluaran produk;
 - p. penyiapan bahan pencegahan penularan;
 - q. penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - r. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil;
 - s. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil;
 - t. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP);
 - u. pelaksanaan pemantauan pelayanan, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengembangan informasi pasar Pelaksanaan fasilitasi promosi produk;
 - v. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil; dan
 - w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor ketahanan pangan, pertanian, dan kesehatan hewan di Provinsi Kepulauan Riau. Hingga Desember 2024, jumlah keseluruhan pegawai di lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 150 orang, yang terdiri dari 72 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 33 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan 41 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan keberagaman, dengan jenjang pendidikan dari tingkat SMA hingga S3. Hal ini mencerminkan adanya potensi dan kapasitas sumber daya manusia yang dapat terus dikembangkan guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Secara rinci, dari total 71 PNS (berdasarkan data tabel pendidikan), sebagian besar telah menempuh pendidikan tinggi, yaitu sebanyak 52 orang berpendidikan Strata 1 (S1), 6 orang berpendidikan Strata 2 (S2), dan 1 orang berpendidikan Strata 3 (S3). Sementara itu, terdapat pula pegawai yang berpendidikan diploma (D3 dan D4), serta sejumlah kecil dengan pendidikan menengah (SMA).

Tabel dibawah ini menyajikan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	S 3	-	1	1
2	S 2	4	2	6
3	S 1	25	27	52
4	D 4	1	-	1
5	D 3	2	7	9
6	D 2	-	-	-
7	D 1	-	-	-
8	SMA	2	-	2
9	SMP	-	-	-
10	SD	-	-	-
Jumlah Total :		34	37	71

Selain dari segi tingkat pendidikan, struktur sumber daya manusia di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau juga dapat dilihat dari persebaran pangkat dan

golongan ruang pegawai negeri sipil. Sampai dengan akhir tahun 2024, pegawai PNS pada dinas ini tersebar dari Golongan II hingga Golongan IV, dengan dominasi berada pada golongan III.

Komposisi pegawai menurut pangkat/golongan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang Penata Tingkat I (Golongan III/d) sebanyak 31 orang, diikuti oleh Pembina (Golongan IV/a) sebanyak 10 orang, serta Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 11 orang. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki masa kerja dan pengalaman yang relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun administratif. Adapun rincian jumlah pegawai menurut golongan dan jenis kelamin disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Pangkat/Golongan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2	Pembina Utama Madya(IV/d)	-	-	-
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	1
4	Pembina Tk. I (IV/b)	3	1	4
5	Pembina (IV/a)	6	4	10
6	Penata Tk. I (III/d)	17	13	31
7	Penata (III/c)	4	5	9
8	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	9	11
9	Penata Muda (III/a)	2	3	5
10	Pengatur Tk. I (II/d)	2	-	2
11	Pengatur (II/c)	-	-	-
12	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
13	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
14	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
15	Juru (I/c)	-	-	-
16	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
17	Juru Muda (I/a)	-	-	-
Jumlah Total :		31	40	71

2. Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja merupakan elemen pendukung yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan kegiatan teknis maupun administratif dapat dilaksanakan secara optimal, baik di tingkat kantor pusat maupun di unit pelayanan teknis di lapangan.

Hingga tahun 2024, dinas ini telah memiliki berbagai jenis sarana kerja yang mendukung pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan kesehatan hewan sejumlah 2.231 unit dengan kondisi sebanyak 2.211 unit kondisi baik dan 20 unit kondisi rusak.

Informasi lebih rinci mengenai jenis dan jumlah sarana kerja yang tersedia di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Baik	Rusak
1.	Tanah	801.000M²	801.000M²	-
	<i>Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan</i>	500.000M ²	500.000M ²	-
	<i>Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan</i>	300.000M ²	300.000M ²	-
	<i>Tanah Bangunan Rumah Pendingin</i>	1.000M ²	1.000M ²	-
2.	Alat-alat Besar	51	51	-
	<i>Wheel Tractor</i>	34	34	-
	<i>Tractor Lain-lain</i>	5	5	-
	<i>Excavator Lain-lain</i>	1	1	-
	<i>Aggregate Washer</i>	1	1	-
3.	Alat-alat Angkutan	49	49	-
	<i>Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)</i>	6	6	-
	<i>Pick Up</i>	6	6	-

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Baik	Rusak
	<i>Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain</i>	2	2	-
	<i>Sepeda Motor</i>	29	29	-
	<i>Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain</i>	6	6	-
4.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	212	212	-
	<i>Mesin Bor</i>	9	9	-
	<i>Mesin Gergaji</i>	2	2	-
	<i>Filling Divice</i>	3	3	-
	<i>Bak Air</i>	45	45	-
	<i>Dongkrak Mekanik</i>	1	1	-
	<i>Tool Kit Set</i>	1	1	-
	<i>Tool Cabinet Set</i>	1	1	-
	<i>Perkakas Khusus Lain-lain</i>	1	1	-
	<i>PH Meter</i>	3	3	-
	<i>Global Positioning System (GPS)</i>	6	6	-
	<i>Alat Ukur/Test klinis Lain-lain</i>	1	1	-
	<i>Scanner</i>	1	1	-
	<i>Termometer Standard</i>	5	5	-
	<i>Microscope</i>	1	1	-
	<i>Air Conditioning Unit</i>	92	92	-
	<i>Timbangan</i>	10	10	-
	<i>Gelas Takar Berbagai Kapasitas Lain-lain</i>	30	30	-
5.	Alat-alat Pertanian / Peternakan	1.024	1.024	-
	<i>Bajak Muara</i>	2	2	-
	<i>Pacul</i>	269	269	-
	<i>Traktor Four Whell (Lengkap Peralatannya)</i>	4	4	-
	<i>Traktor Tangan dengn peralatannya</i>	27	27	-
	<i>Chain Saw</i>	2	2	-
	<i>Container</i>	7	7	-
	<i>Oven</i>	1	1	-
	<i>Rak-rak penyimpanan</i>	2	2	-
	<i>Lemari Penyimpanan</i>	4	4	-
	<i>Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain</i>	1	1	-
	<i>Alat Penggilingan Padi</i>	4	4	-
	<i>Alat Pasca Panen Lain-lain</i>	6	6	-
	<i>Alat Pengering</i>	3	3	-
	<i>Arit</i>	257	257	-
	<i>Penyemprot Mesin (Power Spayer)</i>	4	4	-
	<i>Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)</i>	119	119	-

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Baik	Rusak
	<i>Penyemprot Mesin (Mis Blower)</i>	6	6	-
	<i>Alat Perontok Mesin (Power Thresher)</i>	19	19	-
	<i>Alat Pemipit Jagung</i>	12	12	-
	<i>Rak-rak Penyimpanan</i>	26	26	-
	<i>Lemari Penyimpanan</i>	7	7	-
	<i>Alat Penyimpanan Lain-lain</i>	13	13	-
	<i>Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)</i>	8	8	-
	<i>Alat Laboratorium Lain-lain</i>	223	223	-
				-
6.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.036	2.036	-
	<i>Mesin Ketik Elektronik</i>	3	3	-
	<i>Mesin Hitung Listrik</i>	6	6	-
	<i>Lemari Besi</i>	36	36	-
	<i>Rak Besi/Metal</i>	8	8	-
	<i>Rak Kayu</i>	8	8	-
	<i>Filling Besi/Metal</i>	20	20	-
	<i>Brand Kas</i>	1	1	-
	<i>Lemari Kaca</i>	13	13	-
	<i>Lemari kayu</i>	19	19	-
	<i>Alat Penghancur Kertas</i>	5	5	-
	<i>Papan Nama Instansi</i>	4	4	-
	<i>White Board</i>	6	6	-
	<i>Mesin Absensi</i>	5	5	-
	<i>Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)</i>	10	10	-
	<i>Genset</i>	15	15	-
	<i>Mesin Pompa Air</i>	58	58	-
	<i>Meubilair</i>	1.819	1.819	-
				-
7.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	28	28	-
	<i>Loudspeaker</i>	2	2	-
	<i>Sound System</i>	2	2	-
	<i>Handy Talky</i>	5	5	-

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Baik	Rusak
	<i>Facsimile</i>	3	3	-
	<i>Handphone</i>	7	7	-
	<i>Alat Komunikasi Lain-lain</i>	8	8	-
	<i>Peralatan Microwave Terrestrial Lain-lain</i>	1	1	-
				-
8.	Alat-alat Kedokteran	237	237	-
	<i>Anatomische Pinset</i>	47	47	-
	<i>Scalpel</i>	10	10	-
	<i>ALat Kedokteran Umum Lain Lain</i>	11	11	-
	<i>Air Blower</i>	6	6	-
	<i>Ventilation Fan</i>	10	10	-
	<i>Spatula</i>	14	14	-
	<i>Alat Kedokteran Bedah</i>	7	7	-
	<i>Refrigerator</i>	6	6	-
	<i>Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam</i>	126	126	-
				-
9.	Alat-alat Laboratorium	1.299	1.299	-
10.	Alat-alat Keamanan	76	76	-
11.	Alat-alat Persenjataan	17	17	-
12.	Komputer	38	38	-
13.	Bangunan Gedung	78	78	-
	<i>Bangunan Gedung Kantor</i>	10	10	-
	<i>Bangunan Gudang</i>	13	13	-
	<i>Bangunan Gedung Laboratorium</i>	13	13	-
	<i>Bangunan Gedung Tempat Ibadah</i>	1	1	-
	<i>Bangunan Gedung Pertemuan</i>	1	1	-
	<i>Gedung Pos Jaga</i>	3	3	-
	<i>Gedung Garasi</i>	1	1	-
	<i>Gedung Pemotong Hewan</i>	2	2	-
	<i>Bangunan Untuk Kandang</i>	4	4	-
	<i>Bangunan Gedung Tempat Kerja</i>	8	8	-
	<i>Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja</i>	9	9	-
	<i>Bangunan Gedung Tempat Tinggal/Asrama</i>	2	2	-
	<i>Bangunan Menara Telpon</i>	1	1	-

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Baik	Rusak
14.	Jalan dan Jembatan	17	17	-
15.	Bangunan Air / Irigasi	15	15	-
16.	Instalasi	23	23	-
17.	Jaringan	9	9	-
18.	Buku Perpustakaan	1	1	-
19.	Hewan	2	2	-
20.	Tanaman	3	3	-
21.	Peralatan dan Mesin	2.231	2.211	20

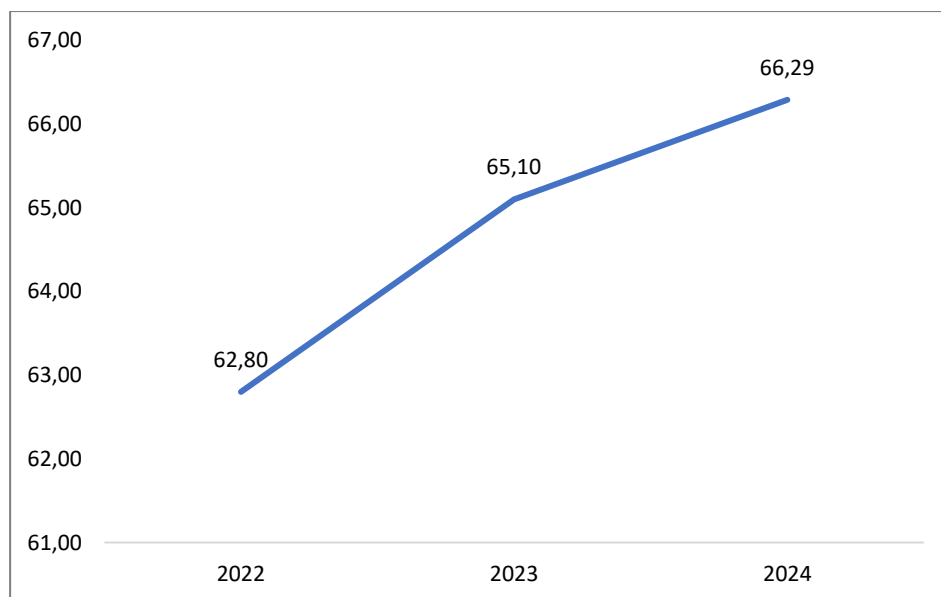
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Kesehatan Hewan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta pengendalian risiko kesehatan hewan yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif, efisien, dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Capaian indikator kinerja menunjukkan seberapa baik kinerja tersebut. Indikator yang digunakan dalam pencapaian kinerja terkait ketahanan pangan, pertanian dan kesehatan hewan sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan dalam kurun waktu 3 tahun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 62,80% sedangkan tahun 2024 meningkat 3,49% dan memiliki realisasi sebesar 66,29%. Perbandingan realisasi Indeks Ketahanan Pangan dapat dilihat pada grafik berikut:



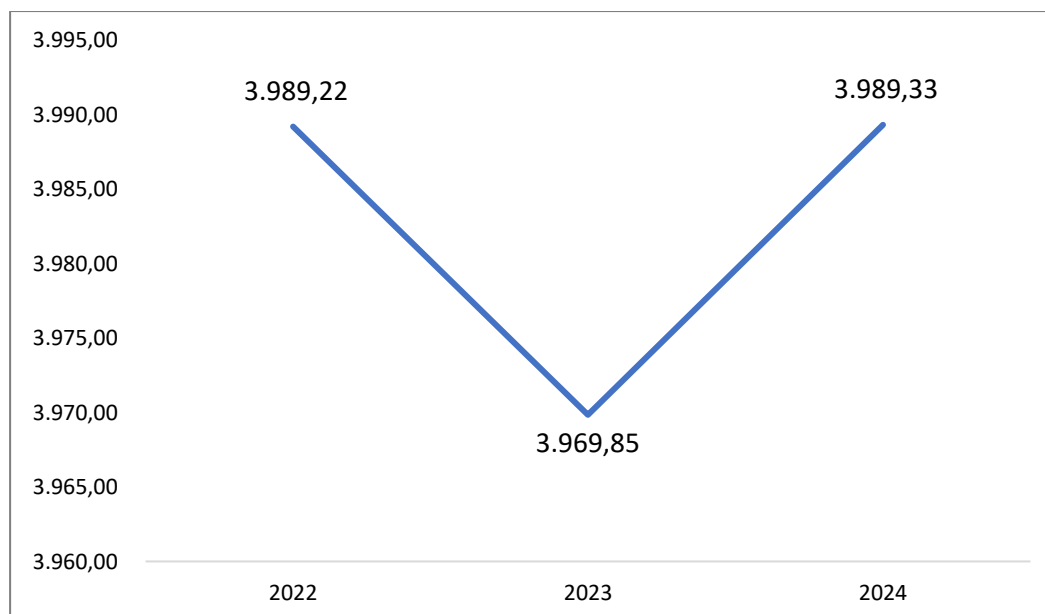
Sumber: LAKIP DKP2KH Prov Kepri

Gambar 2.2. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022-2024

Berdasarkan realisasi pada Indeks Ketahanan Pangan tahun 2022–2024 yang semakin meningkat tiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa pencapaian tersebut merupakan bagian dari upaya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan yang konsisten dalam melaksanakan program strategis guna memperkuat sistem ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta menjaga kesehatan hewan melalui berbagai intervensi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang terkait.

2. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)

Pada indikator Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Harga Berlaku dalam kurun waktu 3 tahun cenderung mengalami peningkatan. pada tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 3.989,22. Pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 3.969,85 dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 3.989,22. Perbandingan realisasi Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku dapat dilihat pada grafik berikut:

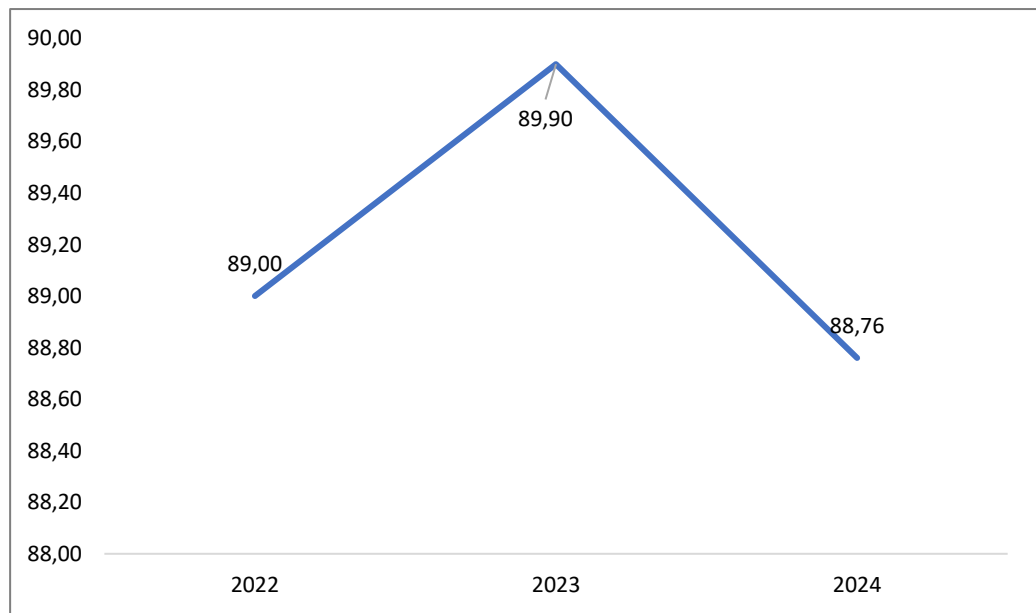


Gambar 2.3. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp.) Tahun 2022-2024

3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat, yang mencerminkan keberagaman dan keseimbangan asupan pangan berdasarkan kelompok bahan pangan yang dianjurkan. Skor ini digunakan untuk menilai sejauh mana pola konsumsi masyarakat telah memenuhi prinsip gizi seimbang, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan intervensi ketahanan pangan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan. Indikator ini mengacu pada pedoman dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dengan rentang skor ideal sebesar **100**, yang menunjukkan pola konsumsi pangan yang sesuai dengan anjuran gizi seimbang (Badan Ketahanan Pangan, 2020).

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dalam kurun waktu 3 tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 89,00 sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 88,76. Perbandingan realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: LAKIP DKP2KH Prov Kepri

Gambar 2.4. Skor PPH Konsumsi Tahun 2022-2024

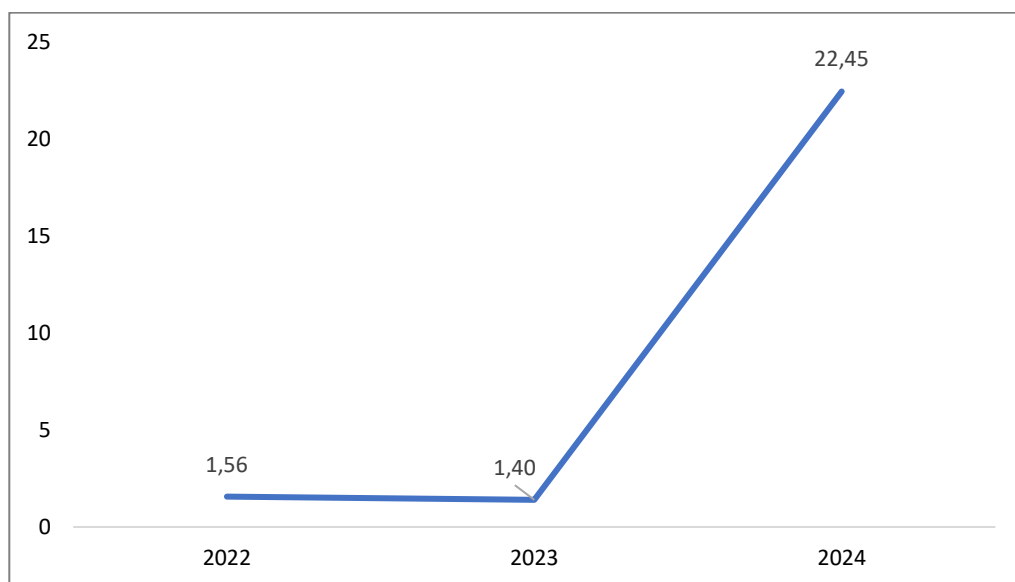
Kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan peningkatan kualitas konsumsi pangan yang seimbang dan aman pada tahun 2024 yaitu:

- Pola konsumsi masyarakat yang masih cukup tinggi dalam mengkonsumsi beras, diperlukan intervensi kebijakan di bidang perberasan melalui implementasi prioritas kebijakan yang berbeda satu daerah dengan daerah lainnya.
- Perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye menggalakkan makanan non beras yang telah ada selama ini di berbagai daerah pedesaan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota seperti : Dinas Pangan dan Pertanian, Tim Penggerak PKK dan stakeholders lainnya.
- Untuk menarik minat masyarakat dalam mengkonsumsi pangan non beras diperlukan diversifikasi pangan melalui pengembangan teknologi pangan yang tidak hanya meningkatkan produksi berbagai macam bahan pangan, namun yang terpenting adalah merubah struktur bahan pangan yang dikonsumsi menjadi kecukupan gizi yang seimbang.

- d. Penganekaragaman pangan yang dilakukan bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras, tetapi juga untuk peningkatan mutu gizi makanan rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

4. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan

Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dalam kurun waktu 3 tahun cenderung mengalami peningkatan. pada tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 1,56% dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup drastic hingga mencapai 22,45%. Perbandingan realisasi Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: LAKIP DKP2KH Prov Kepri

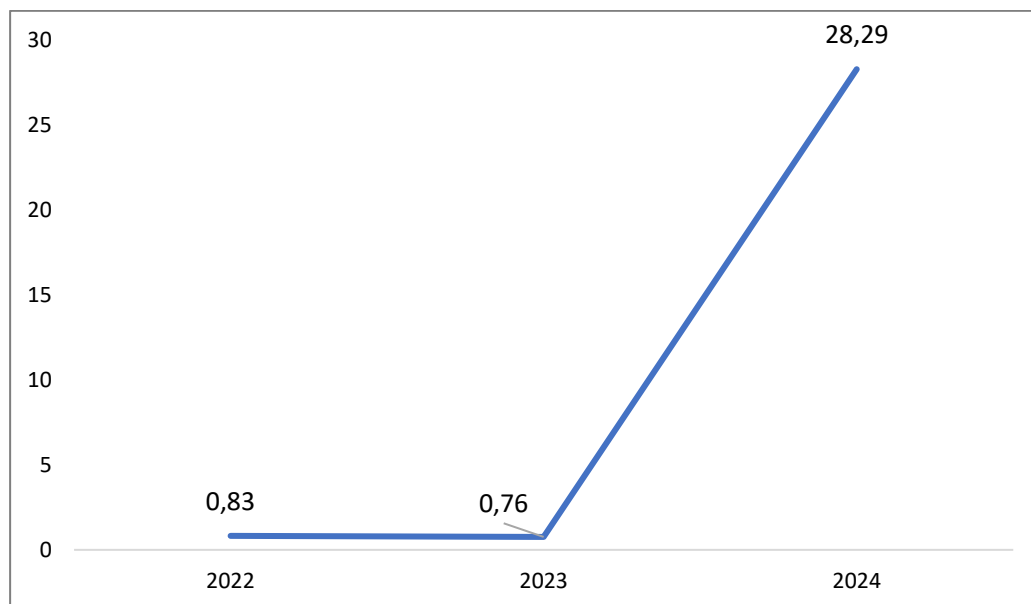
Gambar 2.5. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2022-2024

5. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Holtikultura

Hortikultura (horticulture) berasal dari bahasa Latin hortus (tanaman kebun) dan cultura/colere (budidaya), dan dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Kemudian hortikultura digunakan secara lebih luas bukan hanya untuk budidaya di kebun. Istilah hortikultura digunakan pada jenis tanaman yang dibudidayakan. Bidang kerja hortikultura meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama dan penyakit, panen,

pengolahan, pengemasan dan distribusi. Hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian modern.

Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Holtikultura dalam kurun waktu 3 tahun mengalami peningkatan yang sangat drastis. Pada tahun 2022 sebesar 0,83% dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 28,29%. Perbandingan realisasi Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Holtikultura dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: LAKIP DKP2KH Prov Kepri

Gambar 2.6. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Holtikultura (%) Tahun 2022-2024

6. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ton)

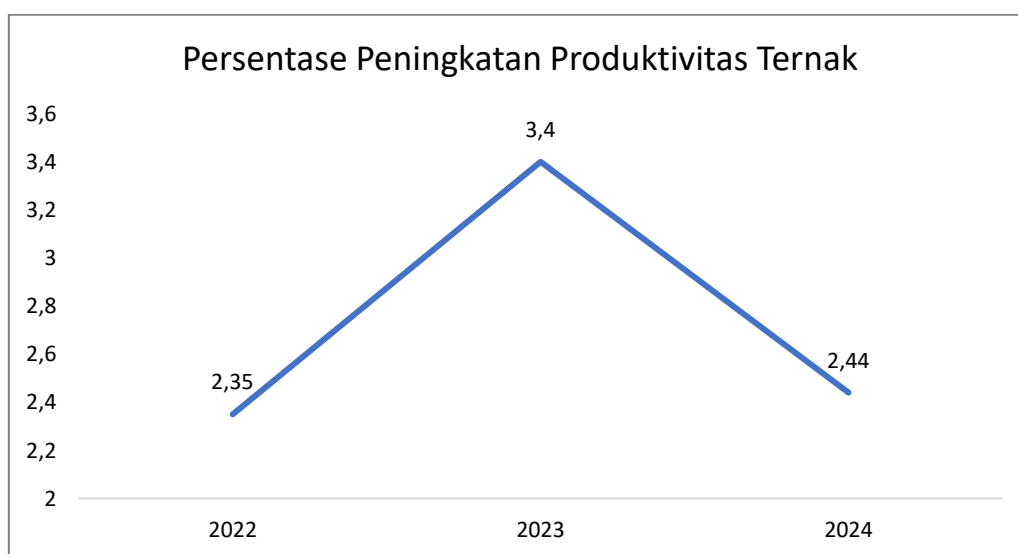
Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat merupakan definisi perkebunan.

Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan dalam kurun waktu 3 tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022

sebesar 2,91 ton dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,89 ton. Sedangkan di tahun 2024 data belum tersedia.

7. Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak

Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak dalam kurun waktu 3 tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 2,35% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 2,44%. Perbandingan realisasi Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: LAKIP DKP2KH Prov Kepri

Gambar 2.7. Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak Tahun 2022-2024

Selama periode perencanaan sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di sektor pangan, pertanian, dan kesehatan hewan. Kinerja pelayanan dinas ini tercermin dari capaian berbagai indikator makro maupun sektoral.

Salah satu indikator penting dalam sektor pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP mencerminkan tingkat kesejahteraan petani dan daya beli rumah tangga petani terhadap barang dan jasa. Selama beberapa tahun

terakhir, NTP Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren fluktuatif, namun secara umum berada mendekati atau sedikit di atas angka 100, yang mengindikasikan bahwa pendapatan petani relatif setara dengan pengeluaran konsumsi dan biaya produksinya. Peningkatan NTP menjadi perhatian strategis karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha tani dan stabilitas ekonomi pedesaan.

Selain itu, indikator Prevalence of Undernourishment (PoU) atau prevalensi kurang gizi/kelaparan juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan ketahanan pangan. PoU mencerminkan proporsi penduduk yang tidak memiliki akses cukup terhadap kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan sehat dan aktif. Berdasarkan data nasional dan regional, Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi tantangan dalam menurunkan angka PoU, yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, distribusi, daya beli masyarakat, serta pola konsumsi pangan. Upaya perbaikan akses dan distribusi pangan lokal, serta diversifikasi konsumsi pangan bergizi, menjadi kunci untuk menurunkan prevalensi ini.

Selain dua indikator tersebut, kinerja pelayanan teknis lainnya juga mencakup capaian di bidang:

- Produksi komoditas pertanian strategis, seperti padi, hortikultura, dan peternakan.
- Ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan, terutama menjelang hari besar keagamaan dan dalam menghadapi perubahan iklim.
- Pengendalian penyakit hewan menular strategis, yang dilakukan melalui vaksinasi, pemantauan kesehatan hewan, dan pelayanan kesehatan hewan masyarakat.
- Penguatan sistem keamanan dan mutu pangan, termasuk pengawasan pangan segar dan penerapan sistem keamanan pangan berbasis risiko.

Kinerja Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari capaian Indikator Kinerja Daerah maupun Indikator Kinerja Program masa lalu yang dilaksanakan selama periodeisasi RPJMD Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

INDIKATOR	SATUAN	TARGET DALAM RPJMD 2021-2024			REALISASI			PERSENTASE REALISASI		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	Indeks	62,80	62,81	63,27	62,80	65,1	66,29	103,73	103,65	104,7
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku (Milyar Rp.)	Milyar	2.177,00	2.181	3996,22	3.989,22	3.969,85	3.989.22	183,24	182,02	182,02
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	86,9	87,70	88,50	89,00	89,9	88,76	102,42	102,51	100,03
Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)	%	1,35	1,42	1,49	1,56	1,40	22,45	115,56	98,59	1506.71
Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Holtikultura (%)	%	0,74	0,77	0,80	0,83	0,76	28.29	112,16	98,70	3536.25
Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ton)	ton	2,8	3,00	-	2,91	2,89	-	103,93	96,33	
Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak (%)	%	1,20	1,25	1,30	2,35	3,4	2,44	193,83	272,00	187,69

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau mencakup:

1. Petani dan Kelompok Tani

Sasaran utama dari dinas ini adalah petani dan kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan pertanian di Provinsi Kepri. Mereka memerlukan layanan dalam bentuk bimbingan, pelatihan, penyuluhan, dan akses terhadap teknologi pertanian

2. Peternak dan Kelompok Peternak

Kelompok peternak yang terlibat dalam usaha peternakan dan kesehatan hewan, seperti peternakan sapi, kambing, ayam, dan sebagainya. Sasaran layanan untuk mereka adalah memastikan kelancaran usaha mereka dengan memitigasi risiko penyakit hewan serta meningkatkan produktivitas ternak.

3. Konsumen dan Masyarakat Umum

Masyarakat umum yang mengonsumsi produk pangan, termasuk produk pertanian dan produk olahan hasil peternakan. Sasaran layanan ini adalah untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau

4. Pelaku Usaha Pertanian

Kelompok usaha pertanian, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar, yang beroperasi di sektor pertanian dan kesehatan hewan. Mereka membutuhkan bantuan teknis, fasilitas pembiayaan, serta pengembangan kapasitas untuk meningkatkan usaha mereka

5. Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kesehatan Hewan

Penyuluh pertanian dan penyuluh kesehatan hewan yang berperan sebagai agen perubahan di lapangan. Sasaran layanan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi mereka sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada petani dan peternak

6. Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah Terkait

Perangkat daerah dan instansi terkait, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan, yang memerlukan koordinasi dalam perencanaan

dan pelaksanaan kebijakan sektor pertanian, pangan, dan kesehatan hewan

7. Lembaga Pendidikan dan Penelitian

Lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi) dan lembaga penelitian yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, pangan, dan kesehatan hewan. Mereka membutuhkan akses data dan informasi terkini untuk riset dan pendidikan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra yang bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau meliputi: penyuluh pertanian, kelompok tani, asosiasi veteriner, lembaga penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang berkontribusi dalam pengembangan teknologi pertanian, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan.

2.2 Permasalahan dan Isu strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis capaian indikator strategis, terdapat sejumlah permasalahan utama yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, dan kesehatan hewan di Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan-permasalahan tersebut diidentifikasi dari kondisi eksisting, capaian indikator makro-sektoral, serta masukan dari pemangku kepentingan. Beberapa permasalahan yang mencerminkan isu strategis daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan pangan yang sangat tergantung dari produksi bahan pangan daerah lain atau negara lain.

Hal ini tercermin dari tingginya persentase impor pangan antar daerah dan luar negeri, terutama untuk komoditas utama seperti beras, daging sapi, sayur, dan buah-buahan. Ketergantungan ini

berdampak pada kerentanan pasokan saat terjadi gangguan distribusi atau fluktuasi harga global.

2. Belum optimalnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Hal ini terlihat dari capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih berada di bawah standar ideal (100), yang menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat belum beragam, bergizi seimbang, dan aman. Konsumsi pangan masih didominasi oleh karbohidrat, dengan asupan protein hewani dan sayuran yang relatif rendah.

3. Masih adanya penduduk pada kategori rentan terhadap kerawanan pangan.

Capaian ini tercermin dari indikator Prevalence of Undernourishment (PoU) yang masih menunjukkan angka signifikan, terutama pada kelompok rumah tangga dengan pendapatan rendah atau akses terbatas terhadap sumber pangan.

4. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi modern.

Kondisi ini menghambat peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hal ini tercermin dari rendahnya produktivitas lahan pertanian dibandingkan rata-rata nasional dan minimnya penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern.

5. Belum optimalnya penggunaan teknologi pertanian dan pengembangan pertanian perkotaan.

Tingkat adopsi teknologi oleh petani masih rendah, yang terlihat dari rendahnya proporsi kelompok tani yang menerapkan inovasi teknologi pertanian maupun pertanian ramah lingkungan dan pertanian urban (urban farming).

6. Belum optimalnya pengelolaan lahan untuk mendukung produktivitas pertanian.

Ditunjukkan oleh luas lahan pertanian produktif yang stagnan atau menurun, serta alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali di beberapa wilayah strategis.

7. Belum optimalnya kualitas kelembagaan kelompok tani.

Permasalahan ini berkaitan erat dengan minimnya cakupan penyuluhan dan kualitas layanan penyuluhan, serta masih terbatasnya jumlah penyuluh pertanian lapangan yang kompeten dan memiliki sertifikasi keahlian.

8. Belum optimalnya penanganan bencana pertanian, baik bencana alam maupun non-alam.

Hal ini tercermin dari tingginya luas areal pertanian yang gagal panen akibat kekeringan, banjir, atau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), serta belum meratanya sistem peringatan dini dan mitigasi risiko pertanian.

9. Belum optimalnya pengendalian kesehatan hewan dan produk asal hewan.

Capaian ini terlihat dari masih ditemukannya produk hewan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, serta terbatasnya cakupan pelayanan kesehatan hewan masyarakat (keswanmas).

10. Belum optimalnya pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan non-PHMS.

Hal ini ditunjukkan dengan kasus-kasus penyakit zoonosis seperti rabies, antraks, atau LSD (Lumpy Skin Disease) yang masih terjadi, serta terbatasnya cakupan vaksinasi hewan ternak di wilayah-wilayah rawan.

2.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan, permasalahan yang dihadapi, isu KLHS yang Relevan, serta isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan hasil perumusan isu strategis, ditetapkan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan sebagai berikut.

1. Masih terbatasnya ketersediaan pangan lokal dan rendahnya kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
2. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana, serta teknologi modern dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.
3. Rendahnya cakupan penyuluhan serta belum optimalnya kompetensi penyuluh dalam mendorong adopsi inovasi dan penguatan kelembagaan petani.
4. Belum optimalnya pengendalian penyakit hewan dan pengawasan produk hewan terhadap standar kesehatan dan keamanan pangan.

Perumusan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan sebagai berikut.

Tabel 2.5. Perumusan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi lahan tidak produktif dan pekarangan yang cukup banyak, dapat dikembangkan untuk pengembangan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan	Ketersediaan pangan yang sangat tergantung dari produksi bahan pangan daerah lain atau negara lain.	• Daya dukung pangan • Daya dukung sumber daya air • Pertanian berkelanjutan	• Perdagangan internasional • Disrupsi teknologi • Perubahan Iklim	Transformasi ekonomi Ketahanan sosial dan ekologi	• Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat Sumatera • Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah.	Masih terbatasnya ketersediaan pangan lokal dan rendahnya kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
	Belum optimalnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.					Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana, serta teknologi modern dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.
	Masih adanya penduduk pada kategori rentan terhadap kerawanan pangan					
	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi modern.					
	Belum optimalnya penggunaan teknologi pertanian dan pengembangan pertanian perkotaan.					
	Belum optimalnya pengelolaan lahan untuk mendukung produktivitas pertanian.					
	Belum optimalnya kualitas kelembagaan kelompok tani					
	Belum optimalnya					Rendahnya cakupan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	penanganan bencana pertanian, baik bencana alam maupun non-alam.					penyuluhan serta belum optimalnya kompetensi penyuluh dalam mendorong adopsi inovasi dan penguatan kelembagaan petani.
	Belum optimalnya pengendalian kesehatan hewan dan produk asal hewan.					Belum optimalnya pengendalian penyakit hewan dan pengawasan produk hewan terhadap standar kesehatan dan keamanan pangan.
	Belum optimalnya pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan non-PHMS					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan

Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Perumusan tujuan dan sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, terukur, dan konsisten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, serta kesehatan hewan.

Sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, serta menjaga kesehatan hewan dan keamanan produk asal ternak, DKP2KH menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan pangan, penguatan sistem pertanian dan peternakan berkelanjutan, serta penanggulangan penyakit hewan strategis.

Tujuan dan sasaran tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur kinerja perangkat daerah, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif, dan selaras dengan pencapaian Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 serta mendukung target pembangunan nasional di bidang ketahanan pangan dan gizi.

Salah satu arah kebijakan nasional sesuai RPJMN Tahun 2025–2029 adalah **penguatan ketahanan pangan dan gizi nasional**. Penguatan ketahanan pangan dan gizi diarahkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), sekaligus meningkatkan peran sektor pertanian, peternakan, dan kesehatan hewan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

Upaya penguatan ketahanan pangan dan gizi tersebut diwujudkan melalui:

1. **Peningkatan ketersediaan dan stabilitas pangan** dengan memperkuat produksi pangan lokal, cadangan pangan pemerintah, serta sistem distribusi yang berkelanjutan.
2. **Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan** berbasis pangan lokal untuk mendorong pola konsumsi B2SA, mengurangi ketergantungan pada beras, dan mengoptimalkan potensi pangan laut dan darat di Kepulauan Riau.
3. **Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan** melalui penyediaan benih, bibit, pakan, serta penerapan teknologi budidaya dan pengolahan hasil yang inovatif.
4. **Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular strategis** guna menjamin kesehatan hewan, keamanan pangan asal ternak, serta melindungi masyarakat dari ancaman zoonosis.
5. **Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan pangan lokal** untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, serta akses pasar domestik dan ekspor.
6. **Penguatan tata kelola pangan dan kesehatan hewan** melalui kebijakan yang terintegrasi, regulasi yang kondusif, kelembagaan yang kompeten, infrastruktur yang memadai, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan RPJMN Tahun 2025–2029, penguatan ketahanan pangan, pertanian, dan kesehatan hewan membutuhkan tata kelola yang adaptif, inovasi teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, juga dilakukan upaya pengembangan pangan lokal berbasis kearifan daerah, peningkatan efektivitas sistem logistik pangan antarwilayah, penguatan cadangan pangan masyarakat, serta penerapan standar keamanan pangan dan kesehatan hewan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Secara garis besar, penguatan ketahanan pangan dan kesehatan hewan sesuai RPJMN Tahun 2025–2029 mencakup:

1. Penguatan tata kelola ketahanan pangan, pertanian, dan kesehatan hewan.
2. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan.
3. Peningkatan diversifikasi pangan lokal dan pemenuhan gizi seimbang masyarakat.

4. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, peternakan, dan pangan lokal.
5. Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis serta jaminan keamanan pangan asal hewan.
6. Pengembangan industri pengolahan berbasis pangan dan peternakan untuk peningkatan daya saing.
7. Penguatan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan SDM di bidang ketahanan pangan, pertanian, dan kesehatan hewan.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yaitu **“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”** dengan misi meliputi sebagai berikut:

Misi 1: Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah

Misi 2: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah

Misi 3: Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter

Misi 4: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan

Misi 5: Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah pada urusan pangan dan pertanian. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan mendukung pencapaian visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu: **“KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA”**. Pencapaian visi ditempuh melalui sebanyak lima misi RPJMD. Salah satu Misi yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan yaitu Misi ke 1

“Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah”.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan menjadi prioritas kinerja dalam perencanaan perangkat daerah. Tujuan dijabarkan lebih detail kedalam sasaran. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja setiap tahunnya melalui Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan alat yang dipergunakan untuk dapat mencapai Visi dan Misi, oleh sebab itu Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan telah merumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran dengan berpedoman pada Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029 dapat dirinci sebagai berikut.

- Tujuan** : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.
- Sasaran 1** : Meningkatnya Kesejahteraan Petani.
- Sasaran 2** :Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman.

Perincian indikator dan target kinerja indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	66,29	66,79	67,29	67,79	68,29	68,79	69,29
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	104,16	100,17	100,2	100,22	100,23	100,24	100,25
		Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	9,57	9,31	9,05	8,78	8,52	8,26	8,00

3.2. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya di jabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana, sarana dan pemanfaatan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan modern untuk menunjang peningkatan produktivitas.
2. Meningkatkan penyuluhan dan pengembangan kompetensi penyuluh untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan
3. Meningkatkan pengendalian penyakit hewan dan pengawasan Kesehatan hewan dan produk asal hewan beredar
4. Meningkatkan Ketersediaan pangan dengan pengembangan pangan lokal
5. Meningkatkan kualitas konsumsi dengan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA)
6. Meningkatkan penanganan kerawanan pangan dengan pemberian bantuan pangan dan optimalisasi cadangan pangan

Perumusan strategi yang ditempuh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Tabel 3.2. Perumusan Strategi Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Meningkatkan prasarana, sarana dan pemanfaatan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan modern untuk menunjang peningkatan produktivitas.
		Meningkatkan penyuluhan dan pengembangan kompetensi penyuluh untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatkan pengendalian penyakit hewan dan pengawasan Kesehatan hewan dan produk asal hewan beredar
	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman	Meningkatkan Ketersediaan pangan dengan pengembangan pangan lokal
		Meningkatkan kualitas konsumsi dengan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA)
		Meningkatkan penanganan kerawanan pangan dengan pemberian bantuan pangan dan optimalisasi cadangan pangan

Pentahapan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 3.3. Pentahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akselerasi penyediaan prasarana, sarana dan pemanfaatan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan modern untuk menunjang peningkatan produktivitas.	Pengembangan pertanian dengan prasarana, sarana dan pemanfaatan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan modern untuk menunjang peningkatan produktivitas.	Penguatan produktivitas pertanian didukung penyediaan prasarana, sarana dan pemanfaatan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan modern	Pemantapan prasarana, sarana dan pemanfaatan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan modern untuk menunjang peningkatan produktivitas.	Perwujudan kualitas prasarana, sarana dan pemanfaatan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan modern untuk menunjang peningkatan produktivitas.
Akselerasi peningkatan penyuluhan dan pengembangan kompetensi	Pengembangan sistem penyuluhan dan kompetensi penyuluh untuk	Penguatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	Pemantapan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui	Perwujudan penyuluhan dan pengembangan kompetensi penyuluh yang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
penyuluh untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	menunjang peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	melalui penyuluhan dan pengembangan kompetensi penyuluh	penyuluhan dan pengembangan kompetensi penyuluh	berkualitas untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan
Akselerasi peningkatan pengendalian penyakit hewan dan pengawasan Kesehatan hewan dan produk asal hewan beredar	Pengembangan sistem pengendalian penyakit hewan dan pengawasan Kesehatan hewan dan produk asal hewan beredar	Penguatan sistem pengendalian penyakit hewan dan pengawasan Kesehatan hewan dan produk asal hewan beredar	Pemantapan sistem pengendalian penyakit hewan dan pengawasan Kesehatan hewan dan produk asal hewan beredar	Perwujudan efektivitas pengendalian penyakit hewan dan pengawasan Kesehatan hewan dan produk asal hewan beredar
Akselerasi peningkatan Ketersediaan pangan dengan pengembangan pangan lokal	Pengembangan pangan lokal untuk meningkatkan Ketersediaan pangan	Penguatan Ketersediaan pangan dengan pengembangan pangan lokal	Pemantapan Ketersediaan pangan dengan pengembangan pangan lokal	Perwujudan Ketersediaan pangan dengan pengembangan pangan lokal
Akselerasi peningkatan kualitas konsumsi dengan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA)	Pengembangan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan	Penguatan kualitas konsumsi dengan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA)	Pemantapan kualitas konsumsi dengan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA)	Perwujudan kualitas konsumsi dengan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA)
Akselerasi peningkatan penanganan kerawanan pangan	Pengembangan sistem penanganan kerawanan	Penguatan sistem penanganan kerawanan	Pemantapan sistem penanganan kerawanan pangan	Perwujudan penanganan kerawanan pangan didukung

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
dengan pemberian bantuan pangan dan optimalisasi cadangan pangan	pangan dengan pemberian bantuan pangan dan optimalisasi cadangan pangan	pangan didukung pemberian bantuan pangan dan optimalisasi cadangan pangan	didukung pemberian bantuan pangan dan optimalisasi cadangan pangan	pemberian bantuan pangan dan optimalisasi cadangan pangan

3.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah Kebijakan yang diambil Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, prasarana pengolahan, serta prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan lainnya.
2. Peningkatan penyediaan pupuk, obat-obatan, alat dan mesin, dan sarana pertanian lainnya kepada petani dan peternak.
3. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan dan peternakan terpadu berbasis potensi wilayah dan berorientasi pasar
4. Pengembangan pertanian perkotaan modern berbasis teknologi informasi.
5. Peningkatan inseminasi buatan dalam peningkatan populasi ternak
6. Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian mengenai Teknik budidaya terbaru dan pengembangan pertanian modern berbasis teknologi dan informasi, dan pengolahan hasil pertanian.
7. Peningkatan kualitas dan pengetahuan kelompok tani dan peternak mengenai teknik budidaya terbaru, dan pengembangan pertanian modern, serta pengolahan dan diversifikasi produk hasil pertanian.

8. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan PHMS dan non PHMS, pemeriksaan dan pengobatan hewan yang sakit.
9. Peningkatan pengawasan keluar/masuk hewan dan produk asal hewan yang beredar.
10. Penguatan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan secara merata di seluruh daerah dan harga pangan yang terjangkau dapat diakses seluruh masyarakat.
11. Pengembangan sumber pangan lokal dengan pemanfaatan pekarangan.
12. Peningkatan komunikasi, edukasi, kampanye, kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) secara massif dan berkelanjutan.
13. Peningkatan dukungan dalam perluasan pelaksanaan program pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah untuk meningkatkan status gizi anak-anak.
14. Peningkatan koordinasi dalam pemenuhan cadangan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan standar
15. Peningkatan penanganan penduduk rentan pangan dan penduduk yang terkena dampak bencana.

Perumusan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Kesehatan Hewan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Meningkatkan prasarana, sarana dan pemanfaatan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan modern untuk menunjang peningkatan produktivitas.	• Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian • Penyediaan jaminan sistem perlindungan petani • Pengembangan sentra pertanian yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, prasarana pengolahan, serta prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan lainnya.
				Peningkatan penyediaan pupuk, obat-obatan, alat dan mesin, dan sarana pertanian lainnya kepada petani dan peternak.
				Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan dan peternakan terpadu berbasis potensi wilayah dan berorientasi pasar
				Pengembangan pertanian perkotaan modern berbasis teknologi informasi.
				Peningkatan inseminasi buatan dalam peningkatan populasi ternak
		Meningkatan penyuluhan dan pengembangan kompetensi penyuluh untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan		Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian mengenai Teknik budidaya terbaru dan pengembangan pertanian modern berbasis teknologi dan informasi, dan pengolahan hasil pertanian.
				Peningkatan kualitas dan pengetahuan kelompok tani dan peternak mengenai teknik budidaya terbaru, dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
				pengembangan pertanian modern, serta pengolahan dan diversifikasi produk hasil pertanian.
		Meningkatkan pengendalian penyakit hewan dan pengawasan Kesehatan hewan dan produk asal hewan beredar		Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan PHMS dan non PHMS, pemeriksaan dan pengobatan hewan yang sakit.
				Peningkatan pengawasan keluar/masuk hewan dan produk asal hewan yang beredar.
	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman	Meningkatkan Ketersediaan pangan dengan pengembangan pangan lokal	Perbaiki tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan	Penguatan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan secara merata di seluruh daerah dan harga pangan yang terjangkau dapat diakses seluruh masyarakat.
		Meningkatkan kualitas konsumsi dengan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA)		Pengembangan sumber pangan lokal dengan pemanfaatan pekarangan.
				Peningkatan komunikasi, edukasi, kampanye, kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) secara massif dan berkelanjutan.
Peningkatan dukungan dalam perluasan pelaksanaan program pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah untuk meningkatkan status gizi anak-anak.				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
		Meningkatkan penanganan kerawanan pangan dengan pemberian bantuan pangan dan optimalisasi cadangan pangan		Peningkatan koordinasi dalam pemenuhan cadangan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan standar
				Peningkatan penanganan penduduk rentan pangan dan penduduk yang terkena dampak bencana.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 - a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
 - c. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - e. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 - a. Penataan Prasarana Pertanian
3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
 - c. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
 - d. Kesejahteraan Hewan

4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
 - a. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
 - b. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
6. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan
 - b. Harga Pangan
 - c. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
 - d. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
7. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
 - a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
 - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
8. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
9. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan secara rinci tercantum pada Tabel (terlampir).

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
2.09.3.27.0.00.09.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan						
- Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani			Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas		Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Evaluasi Perangkat Daerah		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.09.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.09.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.09.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.09.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.09.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.09.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
				Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya yang diadakan serta yang mengikuti pelatihan/pendidikan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.09.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.09.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terpenuhinya Laporan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.09.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Terpenuhinya jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.09.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Produksi Tanaman Pangan (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
					Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
					Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
					Produksi Ternak (Ton)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Tersedianya Laporan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan (Laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan (Laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (laporan)	3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	3.27.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (laporan)	3.27.02.1.01.0003 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	3.27.02.1.01.0004 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (laporan)	3.27.02.1.01.0005 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	3.27.02.1.01.0006 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	3.27.02.1.01.0007 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (laporan)	3.27.02.1.01.0008 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan (Laporan)	3.27.02.1.01.0009 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Peternakan
					Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan (Laporan)	3.27.02.1.01.0010 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Peternakan
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Meningkatnya Sertifikasi kasi Benih/Bibit Tanaman Pertanian	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek (Setek)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	3.27.02.1.02.0006 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	3.27.02.1.02.0007 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata)	3.27.02.1.02.0008 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek (Setek)	3.27.02.1.02.0010 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)	3.27.02.1.02.0011 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.1.02.0012 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.1.02.0013 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.1.02.0014 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6	3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02.0020 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
				Meningkatnya Jumlah Straw (Semen Beku)	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
					Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
					Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
					Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	3.27.02.1.04.0001 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
					Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit	3.27.02.1.04.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
					Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	3.27.02.1.04.0005 - Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner
				Meningkatnya Jumlah Akseptor yang di IB (Inseminasi Buatan)	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	3.27.02.1.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
					Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar (Dokumen)	3.27.02.1.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
					Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	3.27.02.1.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
					Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	3.27.02.1.05.0003 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
					Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	3.27.02.1.05.0004 - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
					Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar (Dokumen)	3.27.02.1.05.0005 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Meningkatnya Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Dosis)	3.27.02.1.07 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
				Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	3.27.02.1.07 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
				Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	3.27.02.1.07 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
				Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	3.27.02.1.07.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
				Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Dosis)	3.27.02.1.07.0003 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
				Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	3.27.02.1.07.0004 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan (Hektar)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				Meningkatnya Prasarana Pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi (Dokumen)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
					Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.1.01.0007 - Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.1.01.0009 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
					Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
					Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit)	3.27.03.1.01.0012 - Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.1.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
					Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01.0014 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
					Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	3.27.03.1.01.0015 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi (Dokumen)	3.27.03.1.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi
					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01.0017 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi (Dokumen)	3.27.03.1.01.0018 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi
					Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01.0019 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
					Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01.0020 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
					Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan (Unit)	3.27.03.1.01.0021 - Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01.0023 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.1.01.0026 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Peternakan
					Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
				Meningkatnya Angka Kesembuhan Penyakit Hewan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	3.27.04.1.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
					Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	3.27.04.1.01.0006 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	3.27.04.1.01.0007 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Tersedianya Jumlah Laporan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tersusun	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	3.27.04.1.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
					Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	3.27.04.1.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
					Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaa HPM (Laporan)	3.27.04.1.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
					Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	3.27.04.1.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
					Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di	3.27.04.1.02.0004 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan,

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM (Laporan)	Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM
					Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	3.27.04.1.02.0005 - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
					Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	3.27.04.1.02.0006 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan
					Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	3.27.04.1.02.0007 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
				Tersedianya Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji.	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
					Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan (Produk)	3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.1.03.0003 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.1.03.0006 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
					Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan (Produk)	3.27.04.1.03.0008 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan
				Meningkatnya Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.1.04 - Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.1.04.0004 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan
				Meningkatnya Jumlah Unit Usaha Ternak yang dilakukan Pengawasan	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	3.27.04.1.05 - Kesejahteraan Hewan
					Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Sertifikat)	3.27.04.1.05 - Kesejahteraan Hewan
					Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	3.27.04.1.05.0002 - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya
					Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Sertifikat)	3.27.04.1.05.0003 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
				Meningkatnya Jumlah luas Lahan pertanian yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.1.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
			Meningkatnya Kapasitas SDM		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Bidang Penyuluh Pertanian			
				Meningkatnya penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.1.01.0003 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.1.01.0004 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
				Meningkatnya Penyuluh Pertanian yang menerapkan teknologi pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
					Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
					Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	3.27.07.1.02.0001 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
					Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
				Meningkatnya Jumlah Unit Lembaga Petani yang diberdayakan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
					Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	3.27.07.1.03.0005 - Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
					Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	3.27.07.1.03.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani
		Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.1.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
					Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.1.01.0007 - Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	2.09.03.1.01.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.1.01.0013 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
				Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				terhadap Cadangan Beras daerah (CBD)		
					Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
					Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
					Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
					Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	2.09.03.1.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	2.09.03.1.02.0005 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
					Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	2.09.03.1.02.0007 - Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
					Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.02.0008 - Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
				Meningkatnya Konsumsi energi perkapita	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
						Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2.09.03.1.04.0001 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	2.09.03.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
				Meningkatnya Konsumsi protein perkapita		2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
						2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
				Meningkatnya daerah yang dilakukan pemetaan kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA)	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.1.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Meningkatnya Total Daerah yang diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan		Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
					Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
					Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	2.09.04.1.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2.09.04.1.02.0003 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	2.09.04.1.02.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	2.09.04.1.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi
					Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
				Meningkatnya sampel pangan asal tumbuhan yang di uji	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	2.09.05.1.01.0006 - Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.1.01.0007 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
					Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	2.09.05.1.01.0008 - Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.1.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
					Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.1.01.0010 - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
2.09.3.27.0.00.09.0001 - UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)						
- Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani			Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas			2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Barang Milik Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Tersedianya Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.09.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpenuhinya Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian			3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Meningkatnya Sertifikasi kasi Benih/Bibit Tanaman Pertanian	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek (Setek)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
					Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	3.27.02.1.02.0007 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata)	3.27.02.1.02.0008 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek (Setek)	3.27.02.1.02.0010 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)	3.27.02.1.02.0011 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.1.02.0012 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.1.02.0013 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umpi yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.1.02.0014 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umpi
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura
					Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3.27.02.1.02.0020 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian			3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				Meningkatnya Prasarana Pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.1.01.0007 - Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
					Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya luas Lahan pertanian yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
					Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.1.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman	3.27.05.1.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2.09.3.27.0.00.09.0002 - UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan						
- Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani			Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks)	
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas			2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terpenuhinya Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.09.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpenuhinya Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian			3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				Meningkatnya Prasarana Pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit)	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian
					Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.1.01.0007 - Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
					Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
					Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit)	3.27.03.1.01.0012 - Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
					Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan (Unit)	3.27.03.1.01.0021 - Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
				Meningkatnya Angka Kesembuhan Penyakit Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
				Tersusunnya Laporan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	3.27.04.1.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
					Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	3.27.04.1.02.0006 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan
				Meningkatnya Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji.	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
					Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan (Produk)	3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.1.03.0003 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
					Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi PersyaratanÂ registrasi Produk hewan (Produk)	3.27.04.1.03.0008 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan
				Meningkatnya Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.1.04 - Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.1.04.0004 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				28.265.589.154 ,65		25.630.104.038 ,65		26.967.958.137 ,65		27.328.469.366 ,65		28.518.628.166 ,65	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				24.699.787.177 ,65		23.933.801.911 ,65		24.659.881.240 ,65		24.665.358.044 ,65		24.970.438.448 ,65	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	89,35	83,19	24.699.787.177 ,65	83,27	23.933.801.911 ,65	83,33	24.659.881.240 ,65	83,41	24.665.358.044 ,65	83,45	24.970.438.448 ,65	2.09.3.27.0.00.09.000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A		A		A		A				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,8	85		86		87		88		89		
2.09.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		150.000.000,00		199.366.781,00		199.366.781,00		199.366.781,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	199.366.781,00	1	199.366.781,00	1	199.366.781,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	1				1		1		1		
2.09.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen				50.000.000,00		75.000.000,00		124.366.781,00		124.366.781,00		124.366.781,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	124.366.781,00	1	124.366.781,00	1	124.366.781,00	
2.09.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		0		0		0	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0	
2.09.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	
2.09.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.206.545.740,65		22.206.545.740,65		22.206.545.741,65		22.206.545.741,65		22.206.545.741,65	
Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	22.206.545.740,65	1	22.206.545.740,65	1	22.206.545.741,65	1	22.206.545.741,65	1	22.206.545.741,65	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)												
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	74	74				74				74		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)												
2.09.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				21.536.545.740 ,65		21.519.425.740 ,65		21.519.425.741 ,65		21.519.425.741 ,65		21.519.425.741 ,65	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	74	74	21.536.545.740 ,65	74	21.519.425.740 ,65	74	21.519.425.741 ,65	74	21.519.425.741 ,65	74	21.519.425.741 ,65	
2.09.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				670.000.000,00		687.120.000,00		687.120.000,00		687.120.000,00		687.120.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	670.000.000,00	1	687.120.000,00	1	687.120.000,00	1	687.120.000,00	1	687.120.000,00	
2.09.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0		0		0		0		0	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0	
2.09.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				33.721.000,00		183.721.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		300.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya yang diadakan serta yang mengikuti pelatihan/pendidikan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	33.721.000,00	5	183.721.000,00	5	185.000.000,00	5	185.000.000,00	5	300.000.000,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		265.000.000,00	
Kelengkapannya													
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	265.000.000,00	
2.09.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				33.721.000,00		33.721.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	33.721.000,00	5	33.721.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	
2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				865.297.916,00		280.099.305,00		456.466.403,00		458.292.003,00		463.106.515,00	
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1	865.297.916,00	1	280.099.305,00	1	456.466.403,00	1	458.292.003,00	1	463.106.515,00	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1										
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1										
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	1										
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1		
2.09.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.893.215,00		4.631.072,00		4.863.139,00		4.863.139,00		4.863.139,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	13.893.215,00	1	4.631.072,00	1	4.863.139,00	1	4.863.139,00	1	4.863.139,00	
2.09.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		10.000.000,00		26.829.166,00		26.829.166,00		93.495.834,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	30.000.000,00	1	10.000.000,00	1	26.829.166,00	1	26.829.166,00	1	93.495.834,00	
2.09.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000,00		3.333.333,00		8.975.935,00		10.801.535,00		8.975.935,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	10.000.000,00		3.333.333,00		8.975.935,00		10.801.535,00		8.975.935,00	
2.09.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000,00		25.000.000,00		33.333.333,00		33.333.333,00		33.333.333,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	75.000.000,00	1	25.000.000,00	1	33.333.333,00	1	33.333.333,00	1	33.333.333,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.399.201,00		4.466.400,00		4.466.400,00		4.466.400,00		4.466.400,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	13.399.201,00	1	4.466.400,00	1	4.466.400,00	1	4.466.400,00	1	4.466.400,00	
2.09.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				8.005.500,00		2.668.500,00		2.850.216,00		2.850.216,00		2.850.216,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	8.005.500,00	1	2.668.500,00	1	2.850.216,00	1	2.850.216,00	1	2.850.216,00	
2.09.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				50.000.000,00		15.000.000,00		25.758.577,00		25.758.577,00		28.550.458,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	1	50.000.000,00		15.000.000,00		25.758.577,00		25.758.577,00		28.550.458,00	
2.09.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				115.000.000,00		15.000.000,00		19.571.200,00		19.571.200,00		19.571.200,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	115.000.000,00		15.000.000,00		19.571.200,00		19.571.200,00		19.571.200,00	
2.09.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000,00		200.000.000,00		312.818.437,00		312.818.437,00		250.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1	500.000.000,00	1	200.000.000,00	1	312.818.437,00	1	312.818.437,00	1	250.000.000,00	
2.09.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000,00		0,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	0,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	
2.09.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				45.000.000,00		100.000.000,00		216.655.404,00		216.655.404,00		216.655.404,00	
Urusan Pemerintah Daerah													
Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	45.000.000,00	6	100.000.000,00	6	216.655.404,00	6	216.655.404,00	6	216.655.404,00	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	5		5		5		5		5		
2.09.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				15.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	5	15.000.000,00	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	
2.09.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		50.000.000,00		116.655.404,00		116.655.404,00		116.655.404,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	30.000.000,00	6	50.000.000,00	6	116.655.404,00	6	116.655.404,00	6	116.655.404,00	
2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				372.223.325,00		61.005.252,00		62.295.102,00		62.295.102,00		72.295.102,00	
Terpenuhinya Laporan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	372.223.325,00	1	61.005.252,00	1	62.295.102,00	1	62.295.102,00	1	72.295.102,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
2.09.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000,00		5.000.000,00		6.289.850,00		6.289.850,00		6.289.850,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.289.850,00	1	6.289.850,00	1	6.289.850,00	
2.09.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				314.207.570,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	1	314.207.570,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.015.755,00		16.005.252,00		16.005.252,00		16.005.252,00		16.005.252,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	48.015.755,00	1	16.005.252,00	1	16.005.252,00	1	16.005.252,00	1	16.005.252,00	
2.09.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				587.588.440,00		510.221.500,00		690.639.960,00		690.639.960,00		710.639.960,00	
Terpenuhinya jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	1	587.588.440,00	1	510.221.500,00	1	690.639.960,00	1	690.639.960,00	1	710.639.960,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	21		21		33		33		33		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	8		8		8		8		8		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3		3		3		3		3		
2.09.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				417.588.440,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	8	417.588.440,00	8	5.000.000,00	8	5.000.000,00	8	5.000.000,00	8	5.000.000,00	
2.09.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan				0,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		325.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	1	0,00	1	305.000.000,00	1	305.000.000,00	1	305.000.000,00	1	325.000.000,00	
2.09.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		25.000.000,00		22.676.750,00		22.676.750,00		22.676.750,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	1	0,00	1	25.000.000,00	1	22.676.750,00	1	22.676.750,00	1	22.676.750,00	
2.09.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		16.666.667,00		49.354.590,00		49.354.590,00		49.354.590,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	21	50.000.000,00	21	16.666.667,00	33	49.354.590,00	33	49.354.590,00	33	49.354.590,00	
2.09.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000,00		28.333.333,00		39.019.320,00		39.019.320,00		39.019.320,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3	70.000.000,00	3	28.333.333,00	3	39.019.320,00	3	39.019.320,00	3	39.019.320,00	
2.09.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		80.221.500,00		178.980.750,00		178.980.750,00		178.980.750,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	0,00	2	80.221.500,00	2	178.980.750,00	2	178.980.750,00	2	178.980.750,00	
2.09.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		90.608.550,00		90.608.550,00		90.608.550,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	90.608.550,00	2	90.608.550,00	2	90.608.550,00	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas				24.699.787.177,65		23.933.801.911,65		24.659.881.240,65		24.665.358.044,65		24.970.438.448,65	2.09.3.27.0.00.09.001 - UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				43.980.176,00		115.099.305,00		172.076.763,00		173.902.365,00		241.535.311,00	
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	0	43.980.176,00	0	115.099.305,00	0	172.076.763,00	0	173.902.365,00	0	241.535.311,00	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		0		0		0				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0				
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
2.09.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.158.000,00		4.631.072,00		4.863.138,00		4.863.138,00		4.863.138,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	4.158.000,00	0	4.631.072,00	0	4.863.138,00	0	4.863.138,00	0	4.863.138,00	
2.09.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		10.000.000,00		26.829.166,00		26.829.166,00		93.495.833,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	10.000.000,00	0	26.829.166,00	0	26.829.166,00	0	93.495.833,00	
2.09.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.335.776,00		3.333.333,00		8.975.933,00		10.801.535,00		8.975.933,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	5.335.776,00	0	3.333.333,00	0	8.975.933,00	0	10.801.535,00	0	8.975.933,00	
2.09.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.969.400,00		25.000.000,00		33.333.333,00		33.333.333,00		33.333.333,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	4.969.400,00	0	25.000.000,00	0	33.333.333,00	0	33.333.333,00	0	33.333.333,00	
2.09.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.500.000,00		4.466.400,00		4.466.400,00		4.466.400,00		4.466.400,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	0	0	1.500.000,00	0	4.466.400,00	0	4.466.400,00	0	4.466.400,00	0	4.466.400,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penggandaan yang Disediakan (Paket)												
2.09.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		2.668.500,00		2.850.216,00		2.850.216,00		2.850.216,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	0	2.668.500,00	0	2.850.216,00	0	2.850.216,00	0	2.850.216,00	
2.09.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		5.000.000,00		25.758.577,00		25.758.577,00		28.550.458,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	5.000.000,00	0	25.758.577,00	0	25.758.577,00	0	28.550.458,00	
2.09.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.820.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	2.820.000,00	0	10.000.000,00	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	
2.09.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.197.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	0	25.197.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	
2.09.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Barang Milik Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.09.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				101.198.880,00		58.505.252,00		58.505.252,00		58.505.252,00		68.505.252,00	
Tersedianya Jumlah Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	101.198.880,00	0	58.505.252,00	0	58.505.252,00	0	58.505.252,00	0	68.505.252,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
2.09.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	
2.09.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				101.198.880,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	0	101.198.880,00	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	0	50.000.000,00	
2.09.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		16.005.252,00		16.005.252,00		16.005.252,00		16.005.252,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	0	16.005.252,00	0	16.005.252,00	0	16.005.252,00	0	16.005.252,00	
2.09.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.765.000,00		47.500.000,00		90.873.910,00		90.873.910,00		90.873.910,00	
Terpenuhinya Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	77.765.000,00	0	47.500.000,00	0	90.873.910,00	0	90.873.910,00	0	90.873.910,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0		0		0		0				
2.09.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				52.485.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	52.485.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.280.000,00		16.666.667,00		49.354.590,00		49.354.590,00		49.354.590,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	25.280.000,00	0	16.666.667,00	0	49.354.590,00	0	49.354.590,00	0	49.354.590,00	
2.09.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		28.333.333,00		39.019.320,00		39.019.320,00		39.019.320,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	0	28.333.333,00	0	39.019.320,00	0	39.019.320,00	0	39.019.320,00	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas				24.699.787.177 ,65		23.933.801.911 ,65		24.659.881.240 ,65		24.665.358.044 ,65		24.970.438.448 ,65	2.09.3.27.0.00.09.0 002 - UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				50.981.700,00		115.099.305,00		172.076.762,00		173.902.364,00		241.535.310,00	
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	50.981.700,00	0	115.099.305,00	0	172.076.762,00	0	173.902.364,00	0	241.535.310,00	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0		
2.09.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.828.500,00		4.631.072,00		4.863.137,00		4.863.137,00		4.863.137,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	1.828.500,00	0	4.631.072,00	0	4.863.137,00	0	4.863.137,00	0	4.863.137,00	
2.09.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		10.000.000,00		26.829.166,00		26.829.166,00		93.495.833,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	10.000.000,00	0	26.829.166,00	0	26.829.166,00	0	93.495.833,00	
2.09.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		3.333.333,00		8.975.933,00		10.801.535,00		8.975.933,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	3.333.333,00	0	8.975.933,00	0	10.801.535,00	0	8.975.933,00	
2.09.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.556.100,00		25.000.000,00		33.333.333,00		33.333.333,00		33.333.333,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	1.556.100,00	0	25.000.000,00	0	33.333.333,00	0	33.333.333,00	0	33.333.333,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.500.000,00		4.466.400,00		4.466.400,00		4.466.400,00		4.466.400,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	1.500.000,00	0	4.466.400,00	0	4.466.400,00	0	4.466.400,00	0	4.466.400,00	
2.09.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		2.668.500,00		2.850.216,00		2.850.216,00		2.850.216,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	0	2.668.500,00	0	2.850.216,00	0	2.850.216,00	0	2.850.216,00	
2.09.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				25.921.100,00		5.000.000,00		25.758.577,00		25.758.577,00		28.550.458,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	25.921.100,00	0	5.000.000,00	0	25.758.577,00	0	25.758.577,00	0	28.550.458,00	
2.09.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				0,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0,00	0	10.000.000,00	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	
2.09.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.176.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	0	20.176.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	
2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.000.000,00		58.505.252,00		58.505.252,00		58.505.252,00		68.505.252,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terpenuhinya Laporan Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	100.000.000,00	0	58.505.252,00	0	58.505.252,00	0	58.505.252,00	0	68.505.252,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
2.09.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	
2.09.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	0	100.000.000,00	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	0	50.000.000,00	
2.09.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		16.005.252,00		16.005.252,00		16.005.252,00		16.005.252,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	0	16.005.252,00	0	16.005.252,00	0	16.005.252,00	0	16.005.252,00	
2.09.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95.485.000,00		47.500.000,00		90.873.910,00		90.873.910,00		90.873.910,00	
Terpenuhinya Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	95.485.000,00		47.500.000,00	0	90.873.910,00	0	90.873.910,00	0	90.873.910,00	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0				0				0		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0				0				0		
2.09.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.125.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	80.125.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	
2.09.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.360.000,00		16.666.667,00		49.354.590,00		49.354.590,00		49.354.590,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	15.360.000,00	0	16.666.667,00	0	49.354.590,00	0	49.354.590,00	0	49.354.590,00	
2.09.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		28.333.333,00		39.019.320,00		39.019.320,00		39.019.320,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	0	28.333.333,00	0	39.019.320,00	0	39.019.320,00	0	39.019.320,00	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				2.768.403.602,00		1.003.903.752,00		1.471.470.952,00		1.733.903.752,00		2.337.233.636,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	88,76	90,1	2.768.403.602,00	90,18	1.003.903.752,00	90,28	1.471.470.952,00	90,36	1.733.903.752,00	90,44	2.337.233.636,00	2.09.3.27.0.00.09.000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				1.900.000.000,00		455.750.000,00		731.317.200,00		855.750.000,00		1.342.483.486,00	
Meningkatnya Jumlah Daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1	1.900.000.000,00	1	455.750.000,00	1	731.317.200,00	1	855.750.000,00	1	1.342.483.486,00	
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen	0	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan Konsumen di Provins (Laporan)												
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	0	1				1				1		
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	0	1				1				1		
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	-	1				1				1		
2.09.03.1.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1.700.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		208.166.441,00	
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	-	1	1.700.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	208.166.441,00	
2.09.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	0	1	0,00	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	
2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		0,00		0,00		50.000.000,00		303.567.045,00	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	50.000.000,00	1	303.567.045,00	
2.09.03.1.01.0007 - Pengembangan usaha Pengolahan Pangan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Berbasis Sumber Daya Lokal													
Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.09.03.1.01.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis				0,00		55.750.000,00		55.750.000,00		55.750.000,00		55.750.000,00	
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	0	1	0,00	1	55.750.000,00	1	55.750.000,00	1	55.750.000,00	1	55.750.000,00	
2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi				100.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		400.000.000,00	
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	400.000.000,00	
2.09.03.1.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi				0,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	0	1	0,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.09.03.1.01.0013 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				50.000.000,00		50.000.000,00		75.567.200,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.567.200,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi				600.000.000,00		379.750.150,00		571.750.150,00		659.750.150,00		659.750.150,00	
Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan terhadap Cadangan Beras daerah (CBD)	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	0	30	600.000.000,00	100	379.750.150,00	100	571.750.150,00	100	659.750.150,00	100	659.750.150,00	
	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	0	1		1		1		1				
	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	0	1		1		1		1				
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	0	3		3		3		3				
2.09.03.1.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				0,00		0,00		62.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	62.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.09.03.1.02.0005 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				0,00		109.750.150,00		109.750.150,00		109.750.150,00		109.750.150,00	
Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	0	3	0,00	3	109.750.150,00	3	109.750.150,00	3	109.750.150,00	3	109.750.150,00	
2.09.03.1.02.0007 - Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				600.000.000,00		220.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	0	30	600.000.000,00	100	220.000.000,00	100	350.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	
2.09.03.1.02.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	0	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi				268.403.602,00		168.403.602,00		168.403.602,00		218.403.602,00		335.000.000,00	
Meningkatnya Konsumsi energi perkapita	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	0	1	268.403.602,00	1	168.403.602,00	1	168.403.602,00	1	218.403.602,00	1	335.000.000,00	
	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
2.09.03.1.04.0001 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal				68.403.602,00		68.403.602,00		68.403.602,00		68.403.602,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal (Dokumen)	0	1	68.403.602,00	1	68.403.602,00	1	68.403.602,00	1	68.403.602,00	1	100.000.000,00	
2.09.03.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		235.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	0	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	235.000.000,00	
Meningkatnya Konsumsi protein perkapita				0		0		0		0		0	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				307.398.375,00		292.398.375,00		292.398.375,00		385.000.000,00		560.956.082,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	7,9	≥10	307.398.375,00	≥10	292.398.375,00	≥10	292.398.375,00	≥10	385.000.000,00	≥10	560.956.082,00	2.09.3.27.0.00.09.000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi				57.398.375,00		57.398.375,00		57.398.375,00		60.000.000,00		140.956.082,00	
Meningkatnya daerah yang dilakukan pemetaan kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA)	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	0	1	57.398.375,00	1	57.398.375,00	1	57.398.375,00	1	60.000.000,00	1	140.956.082,00	
2.09.04.1.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota				57.398.375,00		57.398.375,00		57.398.375,00		60.000.000,00		140.956.082,00	
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	0	1	57.398.375,00	1	57.398.375,00	1	57.398.375,00	1	60.000.000,00	1	140.956.082,00	
2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				250.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		325.000.000,00		420.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Total Daerah yang diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	0	1	250.000.000,00	1	235.000.000,00	1	235.000.000,00	1	325.000.000,00	1	420.000.000,00	
	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1				
	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1				
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	0	1		1		1		1				
2.09.04.1.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.09.04.1.02.0003 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	0	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	
2.09.04.1.02.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				200.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	0	1	200.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.04.1.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		120.000.000,00	
Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	0	1	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	120.000.000,00	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				490.000.000,00		400.000.000,00		544.207.570,00		544.207.570,00		650.000.000,00	2.09.3.27.0.00.09.000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	93,57	84	490.000.000,00	85	400.000.000,00	86	544.207.570,00	87	544.207.570,00	85	650.000.000,00	
2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				490.000.000,00		400.000.000,00		544.207.570,00		544.207.570,00		650.000.000,00	
Meningkatnya sampel pangan asal tumbuhan yang di uji	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	490.000.000,00	1	400.000.000,00	1	544.207.570,00	1	544.207.570,00	1	650.000.000,00	
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1		1		1		1				
	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	0	5		5		5		5				
2.09.05.1.01.0006 - Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan				70.000.000,00		100.000.000,00		144.207.570,00		144.207.570,00		150.000.000,00	
Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	0	5	70.000.000,00	5	100.000.000,00	5	144.207.570,00	5	144.207.570,00	5	150.000.000,00	
2.09.05.1.01.0007 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.09.05.1.01.0008 - Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00	
Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09.05.1.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				370.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00	
terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	370.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	
2.09.05.1.01.0010 - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				11.528.590.186 ,00		7.004.351.638, 00		7.666.776.638, 00		8.806.547.300, 00		14.116.673.209 ,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				2.425.072.000, 00		1.708.000.000, 00		2.123.000.000, 00		2.506.487.000, 00		4.735.987.000, 00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	17.251,6 6	19.960, 1	2.425.072.000, 00	22.783, 17	1.708.000.000, 00	26.004, 19	2.123.000.000, 00	29.663, 76	2.506.487.000, 00	33.814, 08	4.735.987.000, 00	2.09.3.27.0.00.09.0 000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	27.788,8	28.628, 71		29.058, 14		29.494, 01		29.936, 42		30.385, 47		
	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	28.856,8	30.614, 18		31.532, 6		32.478, 58		33.452, 94		34.456, 53		
	Produksi Ternak (Ton)	18.823,3 4	19.247, 61		19.464, 84		19.682, 31		19.903, 25		20.128, 32		
3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				50.000.000,00		150.000.000,00		565.000.000,00		590.000.000,00		765.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan (Laporan)	0	0	50.000.000,00	0	150.000.000,00	1	565.000.000,00	1	590.000.000,00	1	765.000.000,00	
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (laporan)	0	0		0		1		1		1		
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	0	0		0		1		1		1		
	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	0	0		0		1		1		1		
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	0	0		0		1		1		1		
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (laporan)	0	0		0		1		1		1		
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan (Laporan)	0	0		0		1		1		1		
	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (laporan)	0	0		0		1		1		1		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan,				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan Sarana Pendukung Pertanian													
Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	
3.27.02.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	0	1	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.27.02.1.01.0003 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan				0,00		0,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	
3.27.02.1.01.0004 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan (laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.27.02.1.01.0005 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.27.02.1.01.0006 - Pengawasan Sebaran				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sarana Pascapanen Hortikultura													
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura (laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.27.02.1.01.0007 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura (laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.27.02.1.01.0008 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan (laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.27.02.1.01.0009 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Peternakan				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.27.02.1.01.0010 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Peternakan				0,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pertanian	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	0	100	0,00	100	0,00	120	0,00	120	0,00	315	0,00	
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata)	0	130		130		430		430		430		
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek (Setek)	0	200		200		450		500		550		
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	0,8		0,8		1		1		1		
	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	0	0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)	0	66		66		76		76		76		
	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	1.777	0		0		0		0		0		
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	0	0,8		0,8		1		1		1		
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	0	200		200		150		150		150		
3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	1.777	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3.27.02.1.02.0006 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	0	100	0,00	100	0,00	120	0,00	120	0,00	315	0,00	
3.27.02.1.02.0007 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3.27.02.1.02.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata)	0	130	0,00	130	0,00	430	0,00	430	0,00	430	0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.02.1.02.0010 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek (Setek)	0	200	0,00	200	0,00	450	0,00	500	0,00	550	0,00	
3.27.02.1.02.0011 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)	0	66	0,00	66	0,00	76	0,00	76	0,00	76	0,00	
3.27.02.1.02.0012 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	0	200	0,00	200	0,00	150	0,00	150	0,00	150	0,00	
3.27.02.1.02.0013 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	0	0,8	0,00	0,8	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
3.27.02.1.02.0014 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	0	0,8	0,00	0,8	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3.27.02.1.02.0020 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3.27.02.1.04 - Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				37.000.000,00		114.000.000,00		114.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Jumlah Straw (Semen Beku)	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	0	2	37.000.000,00	2	114.000.000,00	2	114.000.000,00	2	150.000.000,00	2	300.000.000,00	
	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
3.27.02.1.04.0001 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1	37.000.000,00	1	37.000.000,00	1	37.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.27.02.1.04.0004 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta				0,00		27.000.000,00		27.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pakan Kewenangan Provinsi													
Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	0	1	0,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.27.02.1.04.0005 - Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas (Orang)	0	2	0,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	
3.27.02.1.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi				300.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		240.987.000,00		240.987.000,00	
Meningkatnya Jumlah Akseptor yang di IB (Inseminasi Buatan)	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar (Dokumen)	-	1	300.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00	1	240.987.000,00	1	240.987.000,00	
	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	-	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	-	1		1		1		1		1		
3.27.02.1.05.0003 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	
3.27.02.1.05.0004 - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				250.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00	
Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	-	1	250.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	
3.27.02.1.05.0005 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		80.987.000,00		80.987.000,00	
Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar (Dokumen)	-	1	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.987.000,00	1	80.987.000,00	
3.27.02.1.07 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				1.397.072.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		1.225.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	0	30	1.397.072.000,00	30	300.000.000,00	40	300.000.000,00	40	400.000.000,00	40	1.225.000.000,00	
	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	0	45		45		45		68		68		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Dosis)	0	100		100		110		125		125		
3.27.02.1.07.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				250.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00	
Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ton)	0	30	250.000.000,00	30	75.000.000,00	40	75.000.000,00	40	100.000.000,00	40	250.000.000,00	
3.27.02.1.07.0003 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				200.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		175.000.000,00	
Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Dosis)	0	100	200.000.000,00	100	75.000.000,00	110	75.000.000,00	125	100.000.000,00	125	175.000.000,00	
3.27.02.1.07.0004 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				947.072.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		800.000.000,00	
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	0	45	947.072.000,00	45	150.000.000,00	45	150.000.000,00	68	200.000.000,00	68	800.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian				2.425.072.000, 00		1.708.000.000, 00		2.123.000.000, 00		2.506.487.000, 00		4.735.987.000, 00	2.09.3.27.0.00.09.0 001 - UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				641.000.000,00		934.000.000,00		934.000.000,00		1.125.500.000, 00		2.205.000.000, 00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pertanian	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)		1	641.000.000,00	1	934.000.000,00	1	934.000.000,00	1	1.125.500.000,00	1	2.205.000.000,00	
	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)		1		1		1		1		1		
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)				0,8		1		1		1		
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek (Setek)				200		200		300		300		
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata)				130		130		130		260		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)				66		66		76		76		
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)				200		200		200				
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)		1.500		1.500		1.500		1.800		5.500		
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)				0,8		0,8		0,9		1		
3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00	
Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)		2.000	100.000.000,00	2.000	100.000.000,00	2.000	100.000.000,00	2.000	100.000.000,00	2.000	200.000.000,00	
3.27.02.1.02.0007 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				391.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		1.110.000.000,00	
Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)		1.500	391.000.000,00	1.500	200.000.000,00	1.500	200.000.000,00	1.800	250.000.000,00	5.500	1.110.000.000,00	
3.27.02.1.02.0008 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh				0,00		50.500.000,00		50.500.000,00		50.500.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata)			0,00	130	50.500.000,00	130	50.500.000,00	130	50.500.000,00	260	100.000.000,00	
3.27.02.1.02.0010 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				0,00		67.000.000,00		67.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek (Setek)			0,00	200	67.000.000,00	200	67.000.000,00	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00	
3.27.02.1.02.0011 - Perbanyak Benih				0,00		66.500.000,00		66.500.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji													
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)			0,00	66	66.500.000,00	66	66.500.000,00	76	100.000.000,00	76	100.000.000,00	
3.27.02.1.02.0012 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00	
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)			0,00	200	75.000.000,00	200	75.000.000,00	200	100.000.000,00	200	110.000.000,00	
3.27.02.1.02.0013 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00	
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)			0,00	0,8	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	
3.27.02.1.02.0014 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00	
Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)			0,00	0,8	75.000.000,00	0,8	75.000.000,00	0,9	100.000.000,00	1	125.000.000,00	
3.27.02.1.02.0018 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00	
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)		1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.02.1.02.0019 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)		1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	
3.27.02.1.02.0020 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)		1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				4.572.956.586, 00		1.676.414.938, 00		1.908.839.938, 00		2.448.705.300, 00		5.107.259.300, 00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan (Hektar)	199	82	4.572.956.586, 00	82	1.676.414.938, 00	85	1.908.839.938, 00	90	2.448.705.300, 00	90	5.107.259.300, 00	2.09.3.27.0.00.09.0 000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian				4.272.956.586, 00		1.326.414.938, 00		1.558.839.938, 00		2.098.705.300, 00		3.564.602.050, 00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan (Unit)	0	0	4.272.956.586, 00	0	1.326.414.938, 00	0	1.558.839.938, 00	0	2.098.705.300, 00	1	3.564.602.050, 00	
	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	76	40		40		50		60		60		
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang	0	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)													
	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0				0		1		1			1
	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1				1		1		1			1
	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0				0		1		1			1
	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1				1		1		1			1
	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0				0		1		1			1
	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit)						1		1		1			1
	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)													
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	0	1				1		1		3			3
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	1				1		1		1			1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)												
3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	0	1	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				0,00		102.727.000,00		102.727.000,00		104.727.000,00		104.727.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Dokumen)	0	1	0,00	1	102.727.000,00	1	102.727.000,00	3	104.727.000,00	3	104.727.000,00	
3.27.03.1.01.0007 - Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian				0		0		0		0		0	
Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0	
3.27.03.1.01.0009 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung	1	1	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pertanian Lainnya (Laporan)												
3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya				0		0		0		0		0	
Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0	
3.27.03.1.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				0,00		0,00		50.000.000,00		100.000.000,00		129.531.000,00	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	129.531.000,00	
3.27.03.1.01.0012 - Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara, dan Terselenggaranya Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit)			0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
3.27.03.1.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				4.132.956.586, 00		523.687.938,00		523.687.938,00		800.000.000,00		2.000.000.000, 00	
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang memanfaatkan (Ha)	76	40	4.132.956.586, 00	40	523.687.938,00	50	523.687.938,00	60	800.000.000,00	60	2.000.000.000, 00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.03.1.01.0014 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura				0,00		0,00		75.000.000,00		100.000.000,00		105.615.750,00	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	105.615.750,00	
3.27.03.1.01.0015 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi				0,00		50.000.000,00		107.425.000,00		107.425.000,00		107.425.000,00	
Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	0	1	0,00	1	50.000.000,00	1	107.425.000,00	1	107.425.000,00	1	107.425.000,00	
3.27.03.1.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		105.750.000,00	
Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi (Dokumen)	0	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	105.750.000,00	
3.27.03.1.01.0017 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan				70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.950.700,00		100.950.700,00	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.950.700,00	1	100.950.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.03.1.01.0018 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		107.750.500,00		107.750.500,00	
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi (Dokumen)	0	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	107.750.500,00	1	107.750.500,00	
3.27.03.1.01.0019 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				0,00		0,00		50.000.000,00		100.950.700,00		100.950.700,00	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	100.950.700,00	1	100.950.700,00	
3.27.03.1.01.0020 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan				70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.950.700,00		100.950.700,00	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.950.700,00	1	100.950.700,00	
3.27.03.1.01.0021 - Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori,				0,00		0,00		0,00		0,00		150.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan													
Terbangunnya, terehabilitasi yang terpeliharanya Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	150.000.000,00	
3.27.03.1.01.0023 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.950.700,00		100.950.700,00	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.950.700,00	1	100.950.700,00	
3.27.03.1.01.0026 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Pernakan				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Peternakan	Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0	1	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian				4.572.956.586, 00		1.676.414.938, 00		1.908.839.938, 00		2.448.705.300, 00		5.107.259.300, 00	2.09.3.27.0.00.09.0 001 - UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian				200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		375.000.000,00	
Meningkatnya Prasarana Pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	0	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	375.000.000,00	
	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	0	1				1		1		1		
3.27.03.1.01.0007 - Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		125.000.000,00	
Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	125.000.000,00	
3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00	
Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	250.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian				4.572.956.586,00		1.676.414.938,00		1.908.839.938,00		2.448.705.300,00		5.107.259.300,00	2.09.3.27.0.00.09.0002 - UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian				100.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		1.167.657.250,00	
Meningkatnya Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan	0	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	1.167.657.250,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit)												
	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan (Unit)	0	0		0		1		1		1		
	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	0	1		1		1		1		1		
3.27.03.1.01.0007 - Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		125.000.000,00	
Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	0	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	125.000.000,00	
3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00	
Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	0	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	250.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.03.1.01.0012 - Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		692.657.250,00	
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara, dan Terselenggaranya Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	692.657.250,00	
3.27.03.1.01.0021 - Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan				0,00		0,00		0,00		0,00		100.000.000,00	
Terbangunnya, tererehabilitasi yang terpeliharanya Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	100.000.000,00	
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				700.000.000,00		1.189.936.700, 00		1.204.936.700, 00		1.321.355.000, 00		1.438.362.455, 00	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	na	65	700.000.000,00	66	1.189.936.700, 00	67	1.204.936.700, 00	68	1.321.355.000, 00	69	1.438.362.455, 00	2.09.3.27.0.00.09.0 000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100.000.000,00		302.751.000,00		302.751.000,00		375.000.000,00		492.758.455,00	
Meningkatnya Angka Kesembuhan Penyakit Hewan	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	302.751.000,00	1	302.751.000,00	1	375.000.000,00	1	492.758.455,00	
	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	0	1				1				1		
	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	0				0				0		
	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	0	1				1				1		
3.27.04.1.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				0,00		102.751.000,00		102.751.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	
Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	0	1	0,00	1	102.751.000,00	1	102.751.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	
3.27.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3.27.04.1.01.0006 - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		267.758.455,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	267.758.455,00	
3.27.04.1.01.0007 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.27.04.1.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi				150.000.000,00		275.084.200,00		275.084.200,00		220.604.000,00		220.604.000,00	
Tersedianya Jumlah Laporan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tersusun	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	0	1	150.000.000,00	0	275.084.200,00	0	275.084.200,00	0	220.604.000,00	1	220.604.000,00	
	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
3.27.04.1.02.0004 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa				50.000.000,00		95.567.100,00		95.567.100,00		70.456.000,00		70.456.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM													
Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	95.567.100,00	1	95.567.100,00	1	70.456.000,00	1	70.456.000,00	
3.27.04.1.02.0005 - Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				50.000.000,00		89.756.100,00		89.756.100,00		75.641.000,00		75.641.000,00	
Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	89.756.100,00	1	89.756.100,00	1	75.641.000,00	1	75.641.000,00	
3.27.04.1.02.0006 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	0	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	
3.27.04.1.02.0007 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				0,00		89.761.000,00		89.761.000,00		74.507.000,00		74.507.000,00	
Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)	0	1	0,00	1	89.761.000,00	1	89.761.000,00	1	74.507.000,00	1	74.507.000,00	
3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan														
Tersedianya Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji.	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)			100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan (Produk)		3											
	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	0	3				3				3			
3.27.04.1.03.0003 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)			0		0		0		0		0		
3.27.04.1.03.0006 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	0	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00		
3.27.04.1.03.0008 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi		3	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
registrasi Produk hewan segar berkemasan	Persyaratan registrasi Produk hewan (Produk)												
3.27.04.1.04 - Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				0,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	0	3	0,00	3	50.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	
3.27.04.1.04.0004 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan				0,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	0	3	0,00	3	50.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	
3.27.04.1.05 - Kesejahteraan Hewan				100.000.000,00		175.751.000,00		175.751.000,00		175.751.000,00		165.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Unit Usaha Ternak yang dilakukan Pengawasan	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Sertifikat)	0	4	100.000.000,00	4	175.751.000,00	4	175.751.000,00	4	175.751.000,00	4	165.000.000,00	
	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	0	1		1		1		1		1		
3.27.04.1.05.0002 - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya				50.000.000,00		75.751.000,00		75.751.000,00		75.751.000,00		45.000.000,00	
Tertanganinya Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	0	1	50.000.000,00	1	75.751.000,00	1	75.751.000,00	1	75.751.000,00	1	45.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya													
3.27.04.1.05.0003 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00	
Terkelolanya penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Sertifikat)	0	4	50.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	120.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				0		0		0		0		0	2.09.3.27.0.00.09.0 001 - UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
													2.09.3.27.0.00.09.0 002 - UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.04.1.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100.000.000,00		106.350.500,00		106.350.500,00		125.000.000,00		125.000.000,00	
Meningkatnya Angka Kesembuhan Penyakit Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	1	100.000.000,00	1	106.350.500,00	1	106.350.500,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	
3.27.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				100.000.000,00		106.350.500,00		106.350.500,00		125.000.000,00		125.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	1	100.000.000,00	1	106.350.500,00	1	106.350.500,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	
3.27.04.1.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi				0,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Tersusunnya Laporan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	0	1	0,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	
3.27.04.1.02.0006 - Pengawasan Peredaran Produk Hewan				0,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	0	1	0,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	
3.27.04.1.03 - Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		215.000.000,00		225.000.000,00	
Meningkatnya Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji.	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	215.000.000,00	1	225.000.000,00	
	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan (Produk)	0	3		3		3		3		3		
3.27.04.1.03.0003 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00	
Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Masyarakat Veteriner (Dokumen)												
3.27.04.1.03.0008 - Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan (Produk)	0	3	0,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	
3.27.04.1.04 - Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)		3	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.27.04.1.04.0004 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)		3	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				302.928.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		505.064.454,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (%)	4.898	435	302.928.000,00	45	200.000.000,00	45	200.000.000,00	45	200.000.000,00	45	505.064.454,00	2.09.3.27.0.00.09.0 000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian (%)	na	746		748		748		748		748		
3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				232.928.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya Jumlah luas Lahan pertanian yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)		20	232.928.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		75										
3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				162.928.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terkendalinya Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		75	162.928.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.27.05.1.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				70.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)		20	70.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				302.928.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		505.064.454,00	2.09.3.27.0.00.09.0 001 - UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP)
3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				70.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		505.064.454,00	
Meningkatnya luas Lahan pertanian yang di lakukan pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	0	50	70.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	505.064.454,00	
	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	20				20				20		
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	0	75				75				100		
3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		255.064.454,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terkendalinya Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	0	75	70.000.000,00	75	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	255.064.454,00	
3.27.05.1.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		125.000.000,00	
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	20	0,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	125.000.000,00	
3.27.05.1.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		125.000.000,00	
Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	0	50	0,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	125.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				0		0		0		0		0	2.09.3.27.0.00.09.0 002 - UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				3.527.633.600, 00		2.230.000.000, 00		2.230.000.000, 00		2.330.000.000, 00		2.330.000.000, 00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	50	54	3.527.633.600, 00	56	2.230.000.000, 00	58	2.230.000.000, 00	60	2.330.000.000, 00	62	2.330.000.000, 00	2.09.3.27.0.00.09.0 000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
3.27.07.1.01 - Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian				600.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	1	600.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	2		2				2				2
3.27.07.1.01.0003 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian				600.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	0	1	600.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	
3.27.07.1.01.0004 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				0,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	2	0,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	
3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				2.927.633.600, 00		2.000.000.000, 00		2.000.000.000, 00		2.100.000.000, 00		2.100.000.000, 00	
Meningkatnya Penyuluh Pertanian yang menerapkan teknologi pertanian	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	50	25	2.927.633.600, 00	25	2.000.000.000, 00	30	2.000.000.000, 00	30	2.100.000.000, 00	30	2.100.000.000, 00	
	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial,	0	4				4				4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)												
3.27.07.1.02.0001 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	0	4	0,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	
3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				2.927.633.600, 00		1.900.000.000, 00		1.900.000.000, 00		2.000.000.000, 00		2.000.000.000, 00	
Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	50	25	2.927.633.600, 00	25	1.900.000.000, 00	30	1.900.000.000, 00	30	2.000.000.000, 00	30	2.000.000.000, 00	
3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Unit Lembaga Petani yang diberdayakan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	0	1	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	0	1		1		1		1				
3.27.07.1.03.0005 - Pendampingan dan pengawasan korporasi petani				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	0	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.27.07.1.03.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	0	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	

4.1.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan perangkat daerah yaitu:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
1.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			2.09.03.1.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			2.09.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
			2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
			2.09.03.1.01.0007 - Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			2.09.03.1.01.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
			2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
			2.09.03.1.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi
			2.09.03.1.01.0013 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
			2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
			2.09.03.1.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
			2.09.03.1.02.0005 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
			2.09.03.1.02.0007 - Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
			2.09.03.1.02.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
			2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
			2.09.03.1.04.0001 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			2.09.03.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Meningkatnya distribusi dan	3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian

	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	kualitas prasarana pertanian	
			3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
			3.27.03.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
			3.27.03.1.01.0007 - Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
			3.27.03.1.01.0009 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
			3.27.03.1.01.0010 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
			3.27.03.1.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
			3.27.03.1.01.0012 - Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
			3.27.03.1.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
			3.27.03.1.01.0014 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
			3.27.03.1.01.0015 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi
			3.27.03.1.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi
			3.27.03.1.01.0017 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
			3.27.03.1.01.0018 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi
			3.27.03.1.01.0019 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan
			3.27.03.1.01.0020 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
			3.27.03.1.01.0021 - Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan
			3.27.03.1.01.0023 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
			3.27.03.1.01.0026 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Peternakan
3.	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	3.27.07.1.02 - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
			3.27.07.1.02.0001 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
			3.27.07.1.02.0002 - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
			3.27.07.1.03 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
			3.27.07.1.03.0005 - Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
			3.27.07.1.03.0006 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi Pemerintah Daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SAT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	9,57	9,31	9,05	8,78	8,52	8,26	8,00
2.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	104,16	100,17	100,2	100,22	100,23	100,24	100,25

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi fokus dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). IKK menjadi alat untuk mengukur keberhasilan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Indikator Kinerja Kunci yang menjadi tanggung jawab Dinas

Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan
Kesehatan Hewan Tahun 2025-2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1.	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	89,35	82,15	83,19	83,27	83,33	83,41	83,45
2.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	7,9	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
3.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	93,57	83	84	85	86	87	85
4.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	88,76	89,3	90,1	90,18	90,28	90,36	90,44
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,8	85	85	86	87	88	89
7.	Persentase Cadangan Pangan	%	72,15	73,59	75,06	76,57	78,10	79,66	81,25
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
8.	Luas Lahan Pertanian yang di manfaatkan	Hektar	199	82	82	82	85	90	90
9.	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	50	52	54	56	58	60	62
10.	Produksi Tanaman Pangan	Ton	17.251,66	17.510,4	19.960,1	22.783,17	26.004,19	29.663,76	33.814,08
11.	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	na	64	65	66	67	68	69
12.	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	%	4.898	42	435	45	45	45	45
13.	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian	%	na	739	746	748	748	748	748
14.	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	27.788,8	28.205,63	28.628,71	29.058,14	29.494,01	29.936,42	30.385,47
15.	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	28.856,8	29.722,5	30.614,18	31.532,6	32.478,58	33.452,94	34.456,53
16.	Produksi Ternak	Ton	18.823,34	19.034,55	19.247,61	19.464,84	19.682,31	19.903,25	20.128,32
17.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	23,34	23,81	24,28	24,77	25,26	25,77	26,28
18.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-33,48	5	5	5	5	5	5

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan Penting Substansial Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Ketahanan pangan menjadi isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau, terutama mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang rentan terhadap gangguan distribusi dan krisis pangan. Oleh karena itu, pengembangan sistem pangan lokal yang inklusif, berbasis sumber daya lokal menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
2. Wilayah pulau-pulau kecil dan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki risiko kerawanan pangan yang tinggi. Oleh karena itu, sistem logistik pangan, cadangan pangan pemerintah daerah, serta penguatan peran masyarakat dalam produksi pangan lokal perlu terus dikembangkan.
3. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk pertanian diarahkan pada pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal. Pendekatan agro-maritim menjadi kunci integrasi lintas subsektor untuk menjawab tantangan keterbatasan lahan, kualitas SDM, dan akses pasar.
4. Untuk mencapai target kinerja pembangunan pangan, pertanian, dan kesehatan hewan, dibutuhkan tata kelola yang efektif, kolaboratif, dan berbasis data. Kolaborasi antar perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat sipil akan menjadi kunci dalam menciptakan dampak pembangunan yang berkelanjutan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

- Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan harus berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) program dan mengarah pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang terukur, terjangkau, dan realistis.
 3. Pelaksanaan Renstra dilaksanakan melalui koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah lainnya, lembaga vertikal, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat guna mendorong integrasi dan efektivitas pelaksanaan program lintas bidang.
 4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, dan berkeadilan, serta menjunjung tinggi integritas dan pelayanan publik yang responsif.
 5. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian serta kesehatan hewan, masyarakat (petani, nelayan, peternak, UMKM) dilibatkan secara aktif sebagai subjek pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan lokal.
 6. Pelaksanaan Renstra mendorong pemanfaatan teknologi digital, sistem informasi, dan inovasi pertanian/ketahanan pangan untuk meningkatkan efisiensi layanan, pengawasan, dan manajemen sumber daya.
 7. Renstra dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, kondisi darurat, atau dinamika strategis yang mempengaruhi pencapaian sasaran secara signifikan.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian dari siklus manajemen pembangunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra). Melalui proses ini, seluruh tahapan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipantau dan dinilai tingkat keberhasilannya, efektivitas pencapaian sasaran, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi Renstra secara berkala, sistematis, dan

berbasis data. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil, memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja organisasi, dan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berikutnya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan maka perlu dilakukan pengelolaan dan pengendalian risiko strategis perangkat daerah. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan secara menyeluruh pada akhir periode lima tahunan melalui Evaluasi Renstra. Pengendalian dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Setiap program dan kegiatan akan dimonitor dengan melibatkan unit teknis, pemangku kepentingan, serta memanfaatkan sistem informasi kinerja yang transparan dan akuntabel.

Dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif, diharapkan seluruh strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam Renstra ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau.

5.4. Pedoman Transisi

Pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari dinamika kebijakan, perubahan regulasi, serta perkembangan isu-isu strategis baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan pedoman transisi untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan pembangunan urusan pangan dan pertanian terutama dalam menghadapi pergantian periode perencanaan berikutnya.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029 memiliki masa berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Pada saat Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan periode berikutnya belum tersusun, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Tahun 2030.